

**ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* (GCG) PADA BANK BRI SYARIAH
KCP LANGKAT STABAT**

SKRIPSI

Oleh :

Wahyu Indri Astuti

NIM 0503161030

Program Studi

PERBANKAN SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* (GCG) PADA BANK BRI SYARIAH
KCP LANGKAT STABAT**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Sumatera Utara

Oleh :
Wahyu Indri Astuti
NIM 0503161030

Program Studi
PERBANKAN SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Indri Astuti
NIM : 050316130
Tempat/Tgl Lahir : Benteng Rejo, 12 Oktober 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : JL.Tuasan Gang Aman

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) PADA BRI SYARIAH KCP LANGKAT STABAT**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 14 Desember 2020

Yang membuat pernyataan



WAHYU INDRI ASTUTI

NIM 050316103

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul :

ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) PADA BRI SYARIAH KCP LANGKAT STABAT

Oleh :

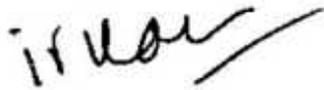
Wahyu Indri Astuti

NIM 0503161030

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Medan, 14 Desember 2020

Pembimbing I



M. Irwan Padli Nst, ST, MM, M. Kom

NIDN. 2013027501

Pembimbing II



Mawaddah Irham, M.E.I

NIDN. 2014048601

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Tuti Anggraini, MA

NIDN. 20310557

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA BRI SYARIAH KCP LANGKAT STABAT” an. Wahyu Indri Astuti, NIM 0503161030 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan pada tanggal 20 Januari 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 25 Januari 2021
Panitia Sidang Munqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah UINSU

Ketua

Tuti Anggraini, MA
NIDN. 20310557

Sekretaris

M. Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I
NIDN. 2016048901

Anggota

1.

M. Irwan Padli Nst, ST, MM, M. Kom
NIDN. 2013027501

2.

Mawaddah Irham, M.E.I
NIDN. 2014048601

3.

Dr. Andri Soemitra, MA
NIDN.2007057602

4.

M. Ikhsan Harahap, M.E.I
NIDN. 0105018901

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Wahyu Indri Astuti (2020), **Analisis Pelaksanaan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada BRI Syariah KCP Langkat Stabat**. Dibawah bimbingan Pembimbing Skripsi I Bapak **M. Irwan Padli Nasution, ST, MM, M.Kom** dan Pembimbing Skripsi II Ibu **Mawaddah Irham, M. E. I**

Bank BRI Syariah KCP Langkat Stabat merupakan bank syariah milik pemerintah yang ada di langkat, yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya sudah menganut prinsip *good corporate governance* (GCG). Kurang efektifnya pelaksanaan prinsip *good corporate governance* (GCG) pada BRI Syariah KCP Langkat Stabat yang menjadi salah satu faktor penyebab penurunan tingkat laba bank pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan prinsip *good corporate governance* (GCG) pada BRI Syariah KCP Langkat Stabat dan kendala dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BRI Syariah KCP Langkat Stabat sudah melaksanakan prinsip *good corporate governance* yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, profesional, pertanggungjawaban, dan kewajaran atau keadilan. Namun ada beberapa prinsip yang belum efektif yaitu pada prinsip transparansi pada indikator visi dan misi bank yang tidak tertera pada laman *website* BRI Syariah KCP Langkat Stabat, prinsip akuntabilitas pada indikator perincian tugas dan tanggung jawab karyawan yang masih terdapat perangkapan *job*, dan prinsip kewajaran pada indikator kesempatan karyawan dalam pelatihan kerja namun tidak terlaksanakan. Adapun kendala yang muncul, diantaranya kurang unggulnya teknologi informasi, kurangnya kesadaran karyawan dalam melaksanakan prinsip GCG, kurangnya jumlah karyawan bank, pihak nasabah yang terkadang melakukan pelanggaran seperti kredit macet, kurangnya waktu dalam hal *training* bagi karyawan baru sehingga kurang maksimal pelaksanaan GCG.

Kata Kunci : Prinsip Good Corporate Governance, BRI Syariah KCP Langkat Stabat

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah, Swt yang telah memberikan kenikmatan berupa Iman, Islam dan juga kesehatan serta kekuatan kepada penulis, walaupun dengan langkah tertatih-tatih namun dengan penuh keyakinan dan Ridho Allah Swt sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sembari dengan senantiasa berdoa semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberkahi-Nya. Selanjutnya shalawat dan salam saya sampaikan kepada Rasulullah Saw yang telah membawa risalah Islam berupa ajaran yang hak lagi sempurna bagi manusia dan seluruh penghuni alam ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan judul ***“Analisis Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance Pada BRI Syariah KCP Langkat Stabat”*** dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti banyak mengalami kesulitan maupun hambatan, namun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak dan izin dari Allah Swt, maka segala kesulitan dan hambatan tersebut dapat peneliti hadapi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Proses pembuatan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka dari itu peneliti ucapkan terima kasih kepada:

1. Terkhusus Kepada kedua orang tua saya Ayahanda tercinta Alm. Paijan yang telah lebih dulu meninggalkan peneliti dan Ibunda tercinta Ngadiyem terimakasih yang senantiasa memberikan segenap cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, memberikan banyak semangat, motivasi dan dukungan, serta do'a yang tak pernah putus. Pada akhirnya penulis dapat meraih gelar sarjana. Semoga Allah membalas semua jasa Ayah dan Bunda. Skripsi ini peneliti persembahkan untuk ayah tercinta.
2. Kepada kakanda Hendrik, Wahyu, Edi, Irma, Suri, Ganda dan Putri. Terimakasih atas semangat dan dorongannya, kalian semua menjadi

penguat semangat bagi penulis untuk meneruskan perjuangan dalam menuntut ilmu hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A selaku rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penulis ucapkan terimakasih telah memberikan peluang untuk menimba ilmu, sehingga peneliti dapat meraih gelar Sarjana di UIN SU Medan.
4. Kepada Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penulis ucapkan terimakasih banyak telah ikut memberikan subangsih, motivasi, dukungan serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Ibu Tuti Angraini, MA selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah dan Bapak Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M. E. I selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberi kelancaran pelaksanaan penelitian dan izin untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak M. Irwan Padli Nasution, ST, MM, M.Kom selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibu Mawaddah Irham, M. E. I selaku Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktu dan kesabaran yang diberikan dalam proses bimbingan, masukan, saran, kritik dan motivasi selama menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan nasehat selama di bangku perkuliahan.
8. Kepada Pimpinan dan karyawan perpustakaan UIN SU terimakasih juga turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada Bapak Sandi Faisal selaku Pimpinan Kantor Cabang BRI Syariah KCP Langkat Stabat yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian dan memberikan informasi terkait penelitian. Dan kepada Ibu Syafridha selaku *Branch Operatinal Supervisor* (BOS) di BRI Syariah KCP Langkat Stabat yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.

10. Kepada seseorang yang spesial Kharisma Ahmad S.Pd peneliti ucapkan terima kasih, selalu memberikan saran, semangat, motivasi serta dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan.
11. Kepada sahabat seperjuangan Prodi Perbankan Syariah Fauziah Mubarak, Siti Mardiah, Ayu Nurzanah dan Ade Alvianita Damanik penulis ucapkan terima kasih, selalu bersama dalam suka maupun duka, selalu memberikan saran, semangat, serta dukungan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan.
12. Kepada sahabat Saya Nur Indah Hasanah, Siti Nurjannah, Suci Indah Lestari, Anggi Sri Aslina, Dwi Angel Arwila, Bella Miranda, Muhammad Ilyas penulis ucapkan terima kasih, selalu memberikan saran, semangat, serta dukungan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan.
13. Kepada teman-teman Perbankan Syariah B 2016. peneliti ucapkan terimakasih karena telah memberi saran, dukungan, motivasi serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh peneliti yang mendukung serta banyak membantu peneliti mengumpulkan data dan informasi untuk penyusunan skripsi ini.

Peneliti panjatkan do'a agar seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga atas bantuan dan amal baiknya mendapat imbalan dan pahala dari Allah Swt. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi peneliti sendiri maupun peneliti berikutnya, dan juga pembaca di masa yang akan datang. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan 14 Desember 2020

Peneliti



Wahyu Indri Astuti
NIM. 0503161030

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah	11
1. Pengertian Bank Syariah	11
2. Fungsi dan Peran Bank Syariah	12
3. Tujuan Bank Syariah.....	13
4. Produk Perbankan Syariah	13
B. Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	16
1. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	16
2. Sejarah Perkembangan <i>Good Corporate Governance</i> di Indonesia	17
3. Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	20
4. Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dalam Bank Syariah	28
5. Tahap-Tahap Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	30

6. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> ..	33
C. Pengertian Efektif	33
D. Kajian Terdahulu.....	35
E. Alur Penelitian	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C. Subjek Penelitian.....	42
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Tahap-Tahap Penelitian	43
F. Metode Pengumpulan Data	44
G. Instrumen Penelitian.....	45
H. Indikator Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	46
I. Teknik Analisis Data.....	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian.....	49
B. Pembahasan.....	58

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73

Daftar Pustaka.....	75
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	78
----------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83
-----------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1 Data Laba, Aset dan Pembiayaan BRI Syariah	6
2.1 Hasil Penelitian	34
3.1 Indikator Penelitian	44

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Hal
2.1 Alur Penelitian	38
4.1 Gambar Logo BRI Syariah	48
4.2 Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Langkat Stabat.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel	Hal
1. Pedoman Wawancara	77
2. Dokumentasi Wawancara.....	79
3. Surat Izin Riset	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia perbankan di Indonesia dalam satu dasawarsa ini memang begitu sangat berkembang dan menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi islam. Bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan pihak perusahaan.

Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank menghadapi berbagai risiko, baik risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional maupun risiko reputasi. Banyaknya ketentuan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat, termasuk ketentuan yang mengatur kewajiban untuk memenuhi modal minimum sesuai dengan kondisi masing-masing bank, menjadi sektor perbankan sebagai sektor yang *Highly Regulated* atau sektor yang diatur dengan kebijakan yang ketat.¹

Krisis perbankan di Indonesia dimulai akhir tahun 1997 bukan semata-mata hanya diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya *good corporate governance* (GCG) dan etika yang memadai. Pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006, Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas Negara mewajibkan perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah untuk segera menerapkan *good corporate governance* (GCG) pada setiap pelaksanaannya. Mengingat bahwa semakin banyaknya risiko yang dihadapi bank, maka semakin meningkat pula kebutuhan praktek *good corporate governance* (GCG) pada perbankan.²

¹ Komite Nasional kebijakan *Corporate Governance*, *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, Januari 2004. h.1

²Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum,(Jakarta : 2006)

Perbankan Syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan yang dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, deposito dan giro kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seiring dengan perkembangan bank syariah maka, satu hal yang harus dicermati yaitu aspek *good corporate governance* (GCG) dalam pelayanan jasa pada perbankan karena terkait dengan berbagai macam risiko kerugian yang jika tidak diperhatikan akan merusak citra syariah pada masa depan. Unsur kepercayaan masyarakat-masyarakat terhadap perbankan merupakan suatu hal yang sangat esensial.

Untuk melakukan pelayanan yang optimal diperlukan suasana kerja dan hubungan antara pihak dalam organisasi yang selaras dan serasi. Hubungan ini dapat tergambar dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau sering disebut *good corporate governance* (GCG). GCG berfokus pada bagaimana cara semua pihak didalam perusahaan, termasuk didalamnya *stakeholder*, untuk memastikan orang yang berasal dari dalam perusahaan senantiasa memiliki alat ukur yang jelas atau mengadaptasi mekanisme untuk menjaga *interest stakeholder*.

Pengertian *corporate governance* menurut Turnbull Report di Inggris yang dikutip oleh Tsuguoki Fujinuma adalah sebagai berikut:³

“Corporate governance is a company’s system of internal control has as its principal aim the management of risks that are significant to the fulfilment of its business objectives, with a view to safeguarding the company’s assets and enhancing over time the value of the shareholders investment. [Corporate governance didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Menurut Bank Dunia (*World Bank*), pengertian *good corporate governance* (GCG) adalah kumpulan hukum, peraturan, kaidah-kaidah yang wajib

³Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance : Teori dan Implementasi*, (Jakarta : Salemba Empat, 2016) h. 2

dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk fungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Secara umum, *good corporate governance* (GCG) merupakan suatu struktur yang diterapkan agar perusahaan dapat semakin berkembang dan terus meningkatkan kinerja dan pelayanan dengan didasarkan oleh perundang-undangan dan nilai etika.⁴ Pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya *good corporate governance* (GCG) oleh perusahaan-perusahaan dan bank di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Pelaksanaan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintahan dalam menegakkan *good governance* pada umumnya di Indonesia.

Pelaksanaan GCG dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*Ethical Driven*) datang dari kesadaran individu-individu karyawan perusahaan untuk menjalankan praktek bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholder*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Disisi lain, dorongan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), kemandirian (*independensi*), dan kewajaran (*fairness*) disingkat dengan kata TARIF. Dalam bagian penjelasan umum PBI No. 11/33/PBI/2009 dikemukakannya sebagai berikut :

⁴ *Forum for Corporate in Indonesia*. 2015. www.fcgi.or.id

⁵ Mas Achmad Daniri, *Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia*; (Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006), h. Sambutan Ketua KNKG.

- a. *Transparency* diartikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif.
- c. *Responsibility* yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- d. *independensi* yaitu memiliki kompetensi maupun bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
- e. *Fairness* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Good Corporate Governance yang pada saat ini lebih terarah pada GCG yang diterapkan di luar negeri sehingga nilai-nilai dalam prinsip syariah islam tidak tercantum didalamnya, meskipun prinsip-prinsip GCG yang saat ini diterapkan sudah cukup baik dan mengarah pada syariat islam. Maka dari sinilah ada suatu hal yang lebih penting dalam pengelolaan sebuah perusahaan yang baik, yaitu penting akan adanya strategi pelayanan yang dapat diartikan sebagai kemudahan yang diberikan sehubungan jual-beli barang atau jasa dalam bisnis perbankan.

Bank BRI Syariah merupakan bank yang mulai beroperasi pada tahun 2008. BRI Syariah Dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah islam. BRI Syariah telah menerapkan GCG dari tahun 2009 sesuai Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Bank

⁶Khotibul Umam, S.H., LL.M dkk. Perbankan Syariah : *Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2016), h. 190

diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas penerapan *GoodCorporate Governance*.⁷

Bank BRI Syariah dituntut untuk melaksanakan praktek GCG dengan menciptakan sistem yang menciptakan kesinambungan dan keseimbangan antara kepengurusan dengan *stakeholders* dalam berbagai bentuk monitoring serta penciptaan pengendalian intern yang menggariskan hubungan dengan antara dewan komisaris, direksi, dan manajemen operasi. Dengan penerapan GCG diharapkan dapat menjaga keseimbangan dalam pengendalian perusahaan untuk mengurangi peluang terjadinya kecurangan (*fraud*) dan kesalahan pengelolaan sehingga dapat menciptakan nilai tambah perusahaan yang optimal kepada para *stakeholdernya*. Hal terpenting adalah memberi keyakinan kepada para *stakeholder* bahwa manajemen bertindak yang terbaik bagi kepentingan perusahaan, dan proses bisnis dilaksanakan sesuai dengan konsep *good corporate governance* untuk mencapai pertumbuhan dan keuntungan dalam jangka panjang serta memenangkan persaingan bisnis global.

BRI Syariah saat ini telah menjadi perusahaan publik dan Bank semakin menghadapi risiko yang *komleks*, maka bank harus menerapkan pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) yang semakin baik. Pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan tidak hanya nasabah dan masyarakat umum namun juga dunia internasional. Hal ini tercermin pada komitmen yang dimiliki BRI Syariah dalam mewujudkan pelaksanaan budaya kepatuhan terhadap peraturan yang beraku baik dari regulator, prinsip syariah dan ketentuan internal yang berlaku.⁸

Berbagai apresiasi implementasi *good corporate governance* telah diterima Bank BRI Syariah sebagai bentuk pengakuan dan kepercayaan dari banyak pihak eksternal baik dari lokal maupun internasional. Salah satu pengakuan dari pihak eksternal atas pelaksanaan *good corporate governance* meraih penghargaan dari *Markplus Jawa Wow Service Excellenceaward 2016* Sebagai *Gold Champion Of Indonesia Wow Service Excellent Award*. Dengan

⁷www.brisyariah.co.id

⁸ *Laporan Pelaksanaan GCG BRI Syariah, 2018*. Diakses pada bulan Maret 2020 pada situs : <https://islamicmarkets.com/publications/bank-brisyariah-annual-report-2018>

adanya pelaksanaan *good corporate governance* maka dapat peningkatan laba, aset, dan pembiayaan di Bank BRI Syariah. Begitu juga sebaliknya jika pelaksanaan *good corporate governance* belum efektif maka akan berdampak pada penurunan laba, aset dan pembiayaan di BRI Syariah.

Tabel 1.1
Data Laba, Aset dan Pembiayaan BRI Syariah

Tahun	Laba Bersih	Aset	Pembiayaan
2018	106.600.000.000	37.869.177.000.000	1.980.000.000.000
2019	74.016.000.000	43.123.488.000.000	2.300.000.000.000

Sumber : www.brisyariah.co.id (Tahun 2019)

Dilihat dari tabel tersebut menunjukkan bahwa laba bersih BRI Syariah tahun 2019 mengalami penurunan 74.016 M dibandingkan tahun 2018 sebesar 106.6 M. sedangkan aset dan pembiayaan mengalami kenaikan. Hal tersebut berarti masih kurang efektifnya pelaksanaan *good corporate governance* pada BRI Syariah.

Menurut Bank Dunia (*World Bank*), pengertian *good corporate governance* (GCG) adalah kumpulan hukum, peraturan, kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk fungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat secara keseluruhan.⁹ Tujuan *good corporate governance* (GCG) yaitu untuk mengatur dan mengelola perusahaan, meningkatkan kemampuan dan akuntabilitas perusahaan, juga akan meningkatkan nilai perusahaan yang diantaranya adalah kinerja keuangan, dan umumnya *good corporate governance* (GCG) dapat meningkatkan kepercayaan investor.¹⁰

⁹ *Forum for Corporate in Indonesia*. 2015. www.fcgi.or.id

¹⁰ Nahdiah, *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI*, (Karya Ilmiah: 2009), h. 3

Dilihat dari teori tersebut, berarti bank BRI Syariah belum melaksanakan prinsip *good corporate governance* (GCG) dengan efektif. Tanpa adanya *good corporate governance* (GCG) yang efektif bank syariah akan sulit bisa memperkuat posisi, memperluas jaringan dan menunjukkan kinerjanya dengan lebih efektif. Kebutuhan bank syariah akan *good corporate governance* (GCG) menjadi sangat serius seiring dengan makin kompleksnya masalah yang dihadapi dimana permasalahan itu akan mengikis kemampuan bank dalam menghadapi tantangan dalam jangka panjang dengan demikian itu merupakan suatu keharusan bagi bank syariah untuk memakai semua ukuran yang dapat membantu meningkatkan perannya.¹¹

Dalam permasalahan tersebut maka peneliti mengambil penelitian di salah satu Bank BRI Syariah kantor cabang pembantu yang terletak di Langkat Stabat. Bank BRI Syariah KCP Langkat Stabat merupakan bank BRI syariah milik pemerintah yang ada di langkat yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya sudah menganut prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada Bank BRI Syariah KCP Langkat Stabat dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) PADA BANK BRI SYARIAH KCP LANGKAT STABAT**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan maka disusunlah identifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Bank BRI Syariah KCP Langkat Stabat mengalami penurunan tingkat laba bersih yang begitu besar padahal disisi lain seperti pembiayaan dan asset mengalami kenaikan.

¹¹ M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2008) h. 13

- b. Bank BRI Syariah telah melaksanakan prinsip *good corporate governance* (GCG) dan meraih penghargaan seharusnya dapat meningkatkan laba bersih yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
- c. Pelaksanaan prinsip *good corporate governance* (GCG) yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran yang diterapkan BRI Syariah KCP Langkat Stabat seharusnya dapat menjadi pengaruh dalam pertumbuhan bank khususnya pertumbuhan pada tingkat laba bersih bank.
- d. Pelaksanaan prinsip *good corporate governance* (GCG) tidak terlepas dari suatu kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank BRI Syariah KCP Langkat Stabat sehingga pelaksanaannya kurang efektif dan menyebabkan penurunan laba.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan mengingat luasnya jangkauan dalam penelitian skripsi ini, maka peneliti melakukan pembatasan masalah yaitu hanya mengkaji pelaksanaan prinsip GCG yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, dan keadilan, serta kendala-kendala dilaksanakannya prinsip GCG pada BRI KCP Langkat Stabat.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan prinsip *good corporate governance* (GCG) yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, profesional, dan kewajaran pada BRI Syariah KCP Langkat Stabat?
- b. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan prinsip *good corporate governance* (GCG) pada BRI Syariah KCP Langkat Stabat?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui apakah pelaksanaan prinsip *good corporate governance* (GCG) pada BRI Syariah KCP Langkat Stabat sudah efektif.
- 2) Untuk mengetahui apakah ada kendala dalam pelaksanaan prinsip *good corporate governance* (GCG) pada BRI Syariah KCP Langkat Stabat.

b. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain :

1) Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa tambahan pengetahuan empiris kepada penulis mengenai pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) di Perbankan Syariah, Disamping pengetahuan konseptual yang telah penulis miliki.

2) Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan referensi empiris bagi peneliti selanjutnya serta lembaga khazanah ilmu pendidikan agar dapat menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) di Indonesia.

3) Institusi Perbankan Syariah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan institusi perbankan syariah lainnya di Indonesia memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan prinsip *good corporate governance* (GCG) sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan yang diantaranya adalah kinerja keuangan, dan meningkatkan kepercayaan investor.

4) Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan keyakinan masyarakat mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) dalam suatu perbankan syariah, khususnya Sumber daya Manusia yang terjun langsung dalam industri perbankan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni *banco* yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin di masa yang datang dilaksanakan di atas meja. Dalam bahasa arab, bank biasa disebut dengan *mashrof* yang berarti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau selain untuk melakukan muamalat.¹²

Menurut UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedang pengertian prinsip syariah itu sendiri adalah aturan berdasarkan hukum Islam.

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan).¹³

Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan-

¹² A. Djazuli dan Yadi Yanuari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat* (Sebuah Pengenalan), (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 53

¹³ Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep & Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta:Renaissance, 2005), h. 18

ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadist, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedang bank konvensional memakai sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Bank syariah lebih menekankan sistem kerja serta partnership, kebersamaan terutama kesiapan semua pihak untuk berbagi termasuk dalam hal-hal keuntungan dan kerugian.

Kehadiran bank syariah diharapkan dapat berpengaruh terhadap kehadiran suatu sistem ekonomi Islam yang menjadi keinginan bagi setiap negara Islam. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan yang selama ini masih didominasi oleh sistem bunga.

2. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut:¹⁴

- a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*), dan giro (*wadiah*), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.
- b. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
- c. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan jasa sosial seperti pinjaman

¹⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), h. 98

kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

3. Tujuan Bank Syariah

Upaya pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya (*profit maximization*) adalah tujuan yang biasa dicanangkan oleh bank komersial, terutama bank konvensional. Berbeda dengan tujuan bank konvensional, bank syariah berdiri untuk menggalakkan, memelihara dan mengembangkan jasa-jasa serta produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mendukung aktivitas investasi dan bisnis yang ada di lembaga keuangan sepanjang aktifitas tersebut tidak dilarang dalam Islam. Selain itu, bank syariah harus lebih menyentuh kepentingan masyarakat kecil.

4. Produk Perbankan Syariah

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Produk Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yaitu:¹⁵

1) Prinsip Jual Beli (*Bay'*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Prinsip ini dapat dibagi sebagai berikut:

a) Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyd bahwa pengertian *murabahah* yaitu: Bahwa pada dasarnya *murabahah* tersebut adalah jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkannya dari modal awal si penjual.

b) Pembiayaan *Salam*

¹⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), h. 98-100

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada.

c) Pembiayaan *Istisna*

Produk *Istisna* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *Istisna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *Istisna* dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

2) Prinsip Sewa

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *Ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bilapada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *Ijarah* objek transaksinya adalah jasa.¹⁶

3) Prinsip Bagi Hasil (*Shirkah*)

a) Pembiayaan *Musharakah*

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *Musharakah* (*shirkah* atau *sharikah* atau serikat atau kongsi). Dalam artian semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *Musharakah* dan dikelola bersama-sama.

b) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudarib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

4) Akad Pelengkap

a) *Hiwalah* (Alih Utang-Piutang)

Tujuan fasilitas *Hiwalah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.

¹⁶ Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PKES Publishing, 2008), h. 36-39

b) *Rahn* (Gadai)

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

c) *Qard* (Pinjaman Uang)

Qard adalah pinjaman uang. Aplikasi *qard* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu: *pertama*, sebagai pinjaman talangan haji, *kedua*, sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*), *ketiga*, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, *keempat*, sebagai pinjaman kepada pengurus bank.

d) *Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkasi dan transfer uang.

e) *Kafalah* (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.¹⁷

b. Produk Penghimpunan Dana

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah*.

c. Produk Jasa

- 1) *Sharf* (*Jual Beli Valuta Asing*) merupakan jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*).
- 2) *Ijarah* (*Sewa*), Menurut bahasa *ijarah* adalah (menjual mafaat). Sedangkan menurut istilah syarak *Ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.

¹⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), h. 105-107

B. Good Corporate Governance (GCG)

1. Pengertian Good Corporate Governance (GCG)

Istilah *good corporate governance* (GCG) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 oleh Komite Cadbury dalam laporannya, yang dikenal sebagai Laporan Cadbury. Laporan ini dipandang sebagai titik balik yang penting dalam mekanisme tata kelola perusahaan di seluruh dunia.¹⁸ Menurut Komite Cadbury, tata kelola perusahaan (*corporate governance*) adalah prinsip langsung yang mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham (*shareholders*) khususnya, dan para pemangku kepentingan di perusahaan (*stakeholders*).

Secara bahasa, *good corporate governance* (GCG) berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Good* berarti baik, *Corporate* berarti perusahaan dan *Governance* artinya pengaturan. Secara umum, istilah *good corporate governance* (GCG) diartikan dalam bahasa Indonesia adalah tata kelola perusahaan yang baik. Secara istilah, definisi GCG menurut Syakhroza mendefinisikan GCG sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.¹⁹

Good corporate governance merupakan sebuah sistem tata kelola organisasi yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara kepentingan internal dan eksternal lainnya dalam kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendaikan organisasi, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).²⁰

¹⁸ Edi Wibowo, *Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, Vol. 10, No. 2, (2010), h. 128.

¹⁹ Rahmadi Usman, "Aspek Hukum Perbankan Syariah", (Jakarta : Sinar Grafika, 2014) h.243

²⁰Hamid, Ahmad dan Mukhlis Yunus, Sulaiman, "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pegawai dan Dampaknya Terhadap Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bireuen". Jurnal ManajemenPascasarjana. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. Vol. 4, No. 4. ISSN 23020199 (November, 2015) h. 3

Menurut Forum *Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) pengertian *good corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur mengendalikan perusahaan.²¹

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) *good corporate governance* adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberi nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham dengan tetap memperlihatkan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.²²

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan yang diantaranya adalah kinerja keuangan, dan umumnya *good corporate governance* (GCG) dapat meningkatkan kepercayaan investor.

2. Sejarah Perkembangan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia

GCG baru ditelah secara mendalam di negara-negara maju sejak tahun 1980-an. Menghangatnya istilah *corporate governance* sejak tahun tersebut sejalan dengankebutuhan sistem perekonomian untuk menanggapi banyaknya kebangkrutan di berbagai perusahaan besar. Sejarah lahirnya GCG muncul atas reaksi para pemegang saham di Amerika Serikat pada tahun 1970-an yang terancam kepentingannya. Timbulnya berbagai skandal besar yang menimpa perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat pada tahun tersebut terjadi dipicu dengan berkembangnya kegiatan berpolitik yang tidak sehat dan budaya korupsi. Terjadinya kegagalan perusahaan berskala besar, skandal-skandal keuangan dan

²¹ Forum for Corporate in Indonesia. 2001. www.fcgi.or.id

²² Komite Nasional kebijakan Corporate Governance, *Pedoman Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia, Januari 2004. h.1

krisis ekonomi di berbagai negara, telah membuat banyak perusahaan memusatkan perhatiannya pada pentingnya penerapan *corporate governance*.²³

Komite Cadbury pada tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Laporan *Cadbury*, dipandang sebagai titik balik yang penting dalam mekanisme tata kelola perusahaan di seluruh dunia. Menurut Komite Cadbury, tata kelola perusahaan (*corporate governance*) adalah prinsip langsung yang mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham (*shareholders*) dan para pemangku kepentingan di perusahaan (*stakeholders*).

Indonesia sendiri mulai menerapkan prinsip GCG sejak menandatangani *Letter of Intent* (LOI) dengan International Monetary Fund (IMF) pada saat krisis moneter tahun 1998. Salah satu bagian penting dari *Letter of Intent* (LOI) tersebut adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan di Indonesia.²⁴

Menurut laporan World Bank pada 1999, krisis ekonomi di Asia Timur disebabkan oleh kegagalan sistematis penerapan *corporate governance* yang berasal dari sistem kerangka hukum yang lemah, standar akuntansi dan standar audit yang tidak konsisten, praktik perbankan yang buruk, pengawasan *board of director* yang tidak efektif, serta kurangnya mempertimbangkan hak pemegang saham minoritas. Bank Pembangunan Asia dalam kajiannya menarik kesimpulan bahwa krisis ekonomi yang menimpa negara-negara ASEAN adalah terutama akibat sistem *corporate governance* yang buruk dalam perekonomian.²⁵

Dikutip dari situs resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (selanjutnya disingkat BPKP), latar belakang kebutuhan atas GCG ada 2 (dua) jenis, yakni dapat dilihat dari latar belakang praktis dan latar belakang akademis sebagai berikut:²⁶

²³ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta :Total Media, 2007), h. 60

²⁴Edi Wibowo, *Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, Vol. 10, No. 2, (2010), h. 128.

²⁵ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 66

²⁶Situs Resmi BPKP 2018, diakses dari: <http://www.bpkp.go.id/dan/konten/299/Good-Corporate.bpkp>. pada: Sabtu, 8 September 2018, pkl. 14.10.

a. Latar belakang praktis

Pengalaman Amerika Serikat yang harus melakukan restrukturisasi *corporate governance* karena munculnya beberapa kasus skandal keuangan seperti *Enron Corp.*, *Worldcom*, *Xerox* dan lainnya yang melibatkan top eksekutif perusahaan sebagai akibat *market crash* pada tahun 1929. *Corporate governance* yang buruk disinyalir juga sebagai salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi politik Indonesia yang dimulai tahun 1997 yang efeknya masih terasa hingga saat ini.

b. Latar belakang akademis

Kebutuhan GCG timbul berkaitan dengan *principal-agency theory*, yaitu untuk menghindari konflik antara *principal* dan *agentnya*. Konflik muncul karena perbedaan kepentingan tersebut haruslah dikelola sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak. Korporasi yang dibentuk dan merupakan suatu entitas tersendiri yang terpisah merupakan subjek hukum, sehingga keberadaan korporasi dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tersebut haruslah dilindungi melalui penerapan GCG. Kajian permasalahan GCG oleh para akademisi dan praktisi juga ada yang berdasarkan pada *stewardship theory* dan lain sebagainya. Bentuk peningkatan *corporate governance* di lingkungan Pemerintah Indonesia serta dorongan dari beberapa lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan Overseas Economic Coordination Fund (OECF), BPKP ikut mengerahkan sumber dayanya untuk mendorong penerapan GCG di lingkungan BUMN atau BUMD.

Perkembangan peraturan-peraturan yang diterapkan di Indonesia mengenai pelaksanaan GCG antara lain:

- a. Pembentukan Komite Nasional tentang Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) melalui Keputusan Menko Ekuin No: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 tentang Pembentukan KNKCG dan menerbitkan Pedoman GCG Indonesia

- b. Pembentukan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) sebagai pengganti KNKCG melalui Surat Keputusan Menko Bidang Perekonomian No: KEP/49/M.EKON/11/2004 yang di dalamnya terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi
- c. Keputusan Menko Bidang Perekonomian RI No:117 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG)
- d. Keputusan Menteri BUMN Nomor 23 Tahun 2000 mengatur dan merumuskan pengembangan praktik GCG dalam perusahaan perseroan
- e. Keputusan Menteri BUMN No: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN
- f. Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Negara BUMN No: PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

3. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), kemandirian (*independensi*), dan kewajaran (*fairness*) disingkat dengan kata TARIF.²⁷ Adapun penjelasan mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) antara lain :

a. Transparansi (*Transparency*)

prinsip transparansi (*transparency*) yaitu mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas,

²⁷ Khotibul Umam, S.H., LL.M dkk. Perbankan Syariah : *Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (PT Raja Grafindo Persada : Jakarta) 2016, h. 190

akurat, dapat diperbandingkan, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan serta masyarakat.

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan prinsip perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholder* sesuai dengan haknya. Informasi yang harus diungkap namu tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendai, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelola risiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank. Dan hal ini tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.²⁸

Didalam akuntansi islam *transparency* juga disebut dengan *misdaqiyah*, yang artinya secara umum adalah menyiapkan hitungan-hitungan akhir serta neraca-neraca keuangan.

Didalam mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang ada harus benar-benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan, karena data-data tersebut merupakan kesaksian. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Al-Furqan (25): 72 berbunyi :

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-

²⁸M. Wahyudin Zakarsyi, *Good Corporate Governance : Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, (Bandung : Alfabeta, 2008), h. 113

perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalu (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.”(Q.S. Al-Furqan (25): 72)²⁹

Selama pihak bank bersifat jujur dalam semua kegiatan, maka selama itu pula ia menjadi orang kepercayaan. Dalam mengungkapkan informasi diharuskan amanah. Hendaknya ia memaparkan informasi yang layak dan menyembunyikan rahasia-rahasia yang wajib ia jaga secara syariah.

Prinsip ini diwujudkan antara lain :

- a) Mengembangkan sistem informasi akuntansi yang berbasiskan standar akuntansi
- b) Mengembangkan informasi teknologi dan sistem informasi manajemen untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
- c) Mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.

Adapun hal-hal yang harus diungkapkan adalah :

1) Financial and Operating Result

Laporan keuangan yang sudah di audit adalah sumber informasi untuk memonitor kinerja keuangan perusahaan untuk meletakkan dasar bagi penilaian aset sekuritas. Diskusi manajemen dan analisis operasi terkadang juga menyertai laporan keuangan, pengungkapan hal-hal diatas akan bermanfaat bagi investor.

2) Tujuan Perusahaan

Tujuan perusahaan harus disosialisasikan kepada lingkungan bisnis dan masyarakat umum. Informasi ini mungkin penting bagi investor dan pengguna lainnya untuk mengevaluasi hubungan perusahaan dengan komunitas tempat mereka beroperasi dan langkah-langkah perusahaan yang akan diambil perusahaan untuk mencapai tujuannya.

²⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir *Alquran dan terjemahnya* (Departemen Agama Republik Indonesia: 2010) h. 366

3) Kepemilikan Saham

Salah satu hak investor adalah mendapatkan informasi tentang struktur kepemilikan perusahaan hingga hak-hak pemilik perusahaan. Pengungkapan yang diperlukan adalah data pemegang saham mayoritas, hak-hak voting khusus, persetujuan pemegang saham dan lain-lain.

4) Isu-Isu material yang berhubungan dengan kepegawaian dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Setiap informasi yang diungkapkan harus di audit terlebih dahulu agar mempunyai standar kualitas yang tinggi, audit harus dilaksanakan oleh auditor independen untuk memberikan informasi yang independen bagi pihak eksternal. Jalur informasi harus mencerminkan keadilan, ketepatan waktu, dan efisiensi biaya agar informasi relevan.

b. Akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan yang tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.

Dalam hal ini bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan. Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati dan konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate value*), sasaran usaha, strategi bank serta memiliki *reward and punishment system*.

Akuntabilitas dilakukan agar perusahaan dapat mempertanggung jawabkan pelayanan secara transparan dan wajar. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. At-Taubah (9) :105 berbunyi :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : *Dan katakanlah : “bekerjalah kamu,maka Allah dan rasulnya serta orang mu’min akan melihat pekerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan Yang Ghaib dan yang Nyata lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (Q.S. At-Taubah:(9) 105)*³⁰

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa implikasi bisnis dan akuntansi dalam individu yang terlibat harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait merupakan wujud pertanggungjawaban masing-masing pengurus dan dapat diterima dengan baik.

Prinsip ini diwujudkan antara lain :³¹

- a) Menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat.
- b) Mengembangkan komite Audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris.
- c) Mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal.

c. Pertanggung Jawaban (*Responsibility*)

Prinsip ini menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggung jawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang

³⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir *Alquran dan terjemahnya* (Departemen Agama Republik Indonesia: 2010) h. 203

³¹ Jujuk Dwiridotjahjono, Penerapan Good Corporate Governance :Manfaat dan Tantangan serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia,Jurnal : Administrasi Bisnis Vol 5 No.2,UPN Fisip Jawa Timur, 2009

hendak dicapai dalam *Good Corporate Governance* yaitu mengkomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan sebagainya.

Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Untuk menjaga kelangsungan usahanya. *Pertama*, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku. *Kedua*, bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.³²

Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu dalam perusahaan harus memiliki rasa pertanggung jawaban yang tinggi dalam pekerjaan mereka sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Anfal (8) : 27 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*” (Q.S. Al-Anfal (8) : 27)³³

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa BRI Syariah harus bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan dalam hal pembiayaan dan melakukan tanggung jawab sosial. Wujud tanggung jawab dalam islam adalah tanggung jawab kepada Allah SWT, tanggung jawab kepada pemilik modal, dan tanggung jawab kepada diri sendiri.

Firman Allah SWT Q.S. Al-Isra' : (17) : 36 berbunyi :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

³² M. Wahyudin Zakarsyi, *Good Corporate Governance : Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, (Bandung : Alfabeta, 2008), h. 114

³³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir *Alquran dan terjemahnya* (Departemen Agama Republik Indonesia: 2010) h.180

Artinya : *"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya akan dimintai pertanggung jawaban."* (Q.S. Al-Isra'(17) : 36)³⁴

Dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya semua akan dimintai pertanggung jawaban, dalam konteks ini Bank BRI Syariah harus berhati-hati dalam menentukan sebuah kebijakan dan langkah dalam menjalankan sistem didalam pelayanan sebuah lembaga, baik dari kepatuhan dalam perundang-undangan yang berlaku maupun aturan secara khusus yang diterapkan oleh kantor pusat, sehingga diharapkan tidak akan terjadi penyimpangan di dalam pelayanan jasa khususnya di bagian pembiayaan.

Penerapan prinsip responsibilitas dapat dilakukan dengan cara:

- a) Membuat berbagai pedoman kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dilaksanakan.
- b) Membentuk unit pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh secara profesional yang terpisah dengan pemberdayaan ekonomi mikro dan koperasi.
- c) Pengelolaan pajak dan produk layanan masyarakat. Jadi pengelolaan operasional perbankan syariah hendaknya dapat dipertanggungjawabkan terhadap *stakeholder* perbankan itu sendiri. Dengan adanya penerapan prinsip ini secara baik maka hal ini akan menjadi nilai tambah bagi perbankan syariah dalam mengembangkan usahanya di masa mendatang.

d. Professional (*Independency*)

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas

³⁴ *Ibid.* h. 284

dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. Firman Allah Q.S. Asy-Shyura (42) : 38 berbunyi :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : “ *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. (Q.S. Asy-Syura (42) : 38)*³⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam membuat keputusan haruslah adil dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun dan seorang mukmin haruslah patuh terhadap seruan Tuhannya, maksudnya adalah karyawan di BRI Syariah harus patuh terhadap peraturan dan undang-undangan yang berlaku dan dalam memutuskan kebijakan haruslah independen yang artinya tidak ada pengaruh dari pihak manapun atau keputusan tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh unsure apapun yang intinya tidak berpihak kepada yang berkepentingan.

Penerapan independensi dapat dilakukan dengan cara:

- a) Penunjukan komisaris independen dan komite audit.
- b) Pengambilan keputusan manajemen yang objektif
- c) Penerapan sistem pengendalian intern yang sehat
- d) Penerapan fungsi manajemen resiko.

e. Kewajaran (*fairness*)

Prinsip keadilan (*fairness*), artinya perlakuan yang adil dan objektif dapat mendorong setiap karyawan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kebijakan penggajian (*remunerasi*) karyawan, hendaknya diterapkan secara objektif dan konsisten, misalnya berdasarkan kinerja. Penghargaan (*reward*) diberikan sesuai dengan prestasi yang dicapai dan sanksi (*punishment*) dikenakan sesuai kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan. Setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan dan

³⁵ *Ibid.* h. 483

pelatihan (*training*) untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan pengalamannya.³⁶

Dalam konteks islam keadilan sangat berkaitan dengan praktek moral yaitu kejujura yang merupakan faktor dominan. Dalam firman Allah SWT prinsip ini dijelaskan pada Q.S. Asy-Syu'ara (26) : 183 berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : “ *Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.* (Q.S. Ash-Shu'ara (26) : 183)³⁷

Dalam ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa BRI Syariah sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana umat haruslah adil dalam menyalurkan, baik dalam penerimaan nisbah bagi hasil, atau penyampaian kebijakan kepada *stakeholder* atau nasabah, diharapkan dengan diwujudkan keadilan ini akan terciptanya pelayanan jasa yang profesional.

4. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam Bank Syariah

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum disebutkan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.³⁸ Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana pada ayat 1 paling kurang harus diwujudkan dalam 7 hal sebagai berikut :³⁹

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank

³⁶ Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance : Teori dan Implementasi*, (Jakarta : Salemba Empat, 2016), h. 198

³⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir *Alquran dan terjemahnya* (Departemen Agama Republik Indonesia: 2010) h. 374

³⁸ Machmud Amir dan Rukmana, *Bank Syariah : Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 2010), h. 81

³⁹ Tikawati, *Implementasi Good Corporate Governance Pada Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Ekonomi*, h. 122-123

- c. Penetapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern
- d. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
- e. Rencana strategi bank
- f. Tranparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank

Corporate Governance merupakan suatu konsepsi yang secara riil dijabarkan dalam bentuk ketentuan/peraturan yang dibuat oleh lembaga otoritas, norma-norma, dan etika yang dikembangkan oleh asosiasi industri dan diadopsi oleh pelaku industri, serta lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas dan peran yang jelas untuk mendorong disiplin, mengatasi dampak *moral hazard*, dan melaksanakan fungsi *check and balance*. Adapun sejumlah perangkat dasar yang diperlukan dalam pembentukan *Good Corporate Governance* pada bank syariah antara lain :

- a. Sistem pengendalian internal
- b. Manajemen risiko
- c. Ketentuan yang mengarah pada peningkatan keterbukaan informasi
- d. Sistem informasi
- e. Mekanisme jaminan kepatuhan syariah
- f. Audit eksternal.

Keenam perangkat diatas pada dasarnya berlaku bagi semua bank, baik konvensional maupun bank syariah. Adapun yang membedakannya adalah bahwa di bank syariah perlu adanya perangkat yang menjamin kepatuhan kepada nilai-nilai dan aturan syariah. Sementara hal demikian tidak dijumpai dalam sistem perbankan konvensional.

Khusus untuk meningkatkan pemenuhan prinsip syariah oleh bank, minimal terdapat dua langkah penting yang perlu dijalani yaitu:

- a. Perlunya mengefektifitaskan aturan dan mekanisme pengakuan (*endorsement*) dari otoritas fatwa dalam hal ini DSN MUI dalam hal menentukan kehalalan atau kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah.
- b. Mengefektifitaskan sistem pengawasan yang mamantau transaksi keuangan bank sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas fatwa

perbankan. Terkait dengan hal ini, permasalahan yang sering muncul adalah masih minimnya ahli yang memiliki pemahaman ilmu fikih dan syariah serta sekaligus memiliki pengetahuan perbankan yang memadai.

5. Tahap-Tahap Pelaksanaan Good Corporate Governance

Dalam pelaksanaan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur didalam perusahaan.

Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG menggunakan pentahapan berikut:

a. Tahap Persiapan

Tahap ini terdiri dari tiga langkah utama yaitu awarness building, GCG assesment, dan GCG manual building. Awarness building merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahliindependen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, dan diskusi kelompok.

GCG Assesment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan GCG saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. Dengan kata lain, GCG assesment dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya.⁴⁰

⁴⁰Thomas Kaihatu, *Good Corporate Governance Dan Penerapannya di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, (Volume 8 Nomor 1, 2006), h. 4

GCG manual building, adalah berikut setelah GCG assesment dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun. Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti:

- Kebijakan GCG perusahaan
- Pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan
- Pedoman perilaku
- Audit commite charter
- Kebijakan disclosure dan transparansi
- Kebijakan dan kerangka manajemen resiko
- Roadmap implementasi

b. Tahap Impelementasi

Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini ada tiga langkah utama yakni:

- 1) Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada di bawah pengawasan direktur yang ditunjuk sebagai GCG champion di perusahaan.
- 2) Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasar roadmap yang telah disusun. Implementasi harus bersifat top down approach yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan.⁴¹ Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen

⁴¹*Ibid.* h.5-6.

perubahan (change management) guna mengawali proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.

- 3) Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.

c. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik GCG yang ada. Terdapat banyak perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa audit yang demikian, dan di Indonesia ada beberapa perusahaan yang melakukan scoring. Evaluasi dalam bentuk assesment, audit, atau scoring juga dapat dilakukan secara mandatory misalnya seperti yang diterapkan di lingkungan BUMN. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi GCG sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.⁴²

Dalam mewujudkan GCG tidaklah semudah yang dilihat akan tetapi harus berdasarkan tahap demi tahap. Untuk memulainya menggunakan tahap persiapan yaitu segala sesuatunya di persiapan secara keseluruhan, kemudian tahap implementasi yaitu untuk pengenalan tentang GCG dan bagaimana penerapannya, selanjutnya tahap evaluasi yaitu memeriksa GCG yang diterapkan dari pihak luar oleh eksternal audit.

⁴²*Ibid.* h.7-8.

6. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Syariah

Bank Indonesia dalam rangka program restrukturisasi Perbankan Nasional pada tahun 2004 telah meluncurkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai suatu kerangka menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri Perbankan Indonesia ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan dimaksud dilandasi oleh visi mencapai kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pelaksanaan sistem *good corporate governance* dalam perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) melalui beberapa tujuan berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai, dan *stakeholders* lainnya yang merupakan solusi elegan dalam menghadapi tantangan organisasi ke depan.
- b. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *stakeholders*.
- d. Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan, dan partisipasi organisasi secara legitimate.
- e. Meminimalkan *agency cost* dengan mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antara pihak prinsipal dengan agen.
- f. Meminimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal. Meningkatkan nilai perusahaan yang dihasilkan dari biaya modal yang lebih rendah, meningkatkan kinerja keuangan dan persepsi yang lebih baik daripada *stakeholders* atas kinerja perusahaan pada masa depan.⁴⁸

⁴⁸ *Tujuan Good Corporate Governance Bank Syariah*, <https://sharianomic.wordpress.com>. Diunduh pada tanggal 11 Februari 2020.

Tujuan *good corporate governance* bagi bank umum maupun bank syariah untuk meningkatkan kinerja bank yang dapat melindungi hak, dan kewajiban, serta memberikan nilai tambah para *stakeholders*.

Manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang melaksanakan *good corporate governance* menurut Hery, yaitu:

- a. *good corporate governance* secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
- b. *good corporate governance* dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.
- c. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
- d. Membangun manajemen dan *Corporate Board* dalam pemantauan penggunaan aset perusahaan.
- e. Mengurangi korupsi.¹⁸

C. Pengertian Efektif

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Dalil tentang efektif Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216 :

عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ

شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : *Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu,*

¹⁸ Hery, *Potret Profesi Audit Internal*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 45

*padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*⁴³

Efektif menurut Peter F. Drucker adalah mengerjakan pekerjaan yang benar (*doing the right things*).⁴⁴

Menurut SP. Siagian, efektif adalah tercapainya berbagai sasaran yang ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan kegiatan tertentu.⁴⁵

Dari pendapat di atas bahwa efektif merupakan sesuatu yang dikerjakan atau dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, tepat waktu sehingga tercapai tujuan yang hendak dicapai.

D. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan erat kaitannya dengan masalah-masalah penelitian yang dilakukan. Setelah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang masalahnya terdapat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Penelitian Dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
Eric Friendly, mahasiswa Universitas Kristen Petra (2017) judul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip GCG	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan data primer dan data	Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa subjek penelitian sudah menerapkan sebagian komponen di dalam prinsip TARIF. Tetapi	Peneliti terdahulu melakukan penelitian di perusahaan milik keluarga, bidang perhotelan sedangkan peneliti di bank syariah

⁴³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir *Alquran dan terjemahnya* (Departemen Agama Republik Indonesia: 2010) h. 34

⁴⁴ Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawann Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta:Kencana, 2010), cet ke-5, h. 7

⁴⁵ T. Hani Handoko, *Organisasi Perusahaan Teori, Struktur, dan Perilaku*, (Yogyakarta : BPFE, 2000), cet. Ke-2, h. 50

Pada Perusahaan Milik Keluarga Bidang Perhotelan”	sekunder	perusahaan belum sepenuhnya menerapkan prinsip GCG tersebut	
Ekky Dwi Ferlinda (2013). “Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan (Studi Pada PT. Telkom Banyuwangi)”	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan data primer dan data sekunder	Hasil penelitian tersebut yaitu: kurang pemahaman tentang <i>good corporate governance</i> walaupun semangat dari karyawan tinggi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.	Penelitian terdahulu melakukan penelitian di PT. Telkom sedangkan peneliti di Lembaga Perbankan dan Penelitian terdahulu memfokuskan pada implementasi <i>good corporate governance</i> dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Sedangkan peneliti memfokuskan pada apakah pelaksanaan <i>good corporate governance</i> pada Bank Syariah KCP Langkat Stabat sudah berjalan efektif. serta kendala-kendala dalam pelaksanaan <i>good corporate governance</i> .
Resti Ardhanawati	Kualitatif dengan	Hasil penelitian yaitu: belum terlaksana	Penelitian terdahulu memfokuskan

<p>(2017) “Pelaksanaan Dan Pengungkapan <i>Good Corporate Governance</i> Pada Bank Umum Syariah”</p>	<p>pendekatan deskriptif dan menggunakan data primer dan data sekunder</p>	<p>dengan baik prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>. Maka dari itu pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> sangat dibutuhkan di lembaga keuangan karena memiliki risiko yang lebih tinggi</p>	<p>pelaksanaan dan pengungkapan <i>Good Corporate Governance</i> sedangkan peneliti memfokuskan pelaksanaan <i>good corporate governance</i> apakah sudah berjalan efektif serta kendala-kendala dalam pelaksanaan <i>good corporate governance</i>.</p>
<p>Hansen Christian Setyanto dan Wilma Laura Sahetapy mahasiswa Universitas Kriaten Petra,(2018) judul “Penerapan Prinsip-Prinsip GCG pada PT. Rofaca Karalmasih Abadi Cabang Sidoarjo”</p>	<p>Kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan data primer dan data sekunder</p>	<p>Hasil penelitiannya yaitu : menunjukkan bahwa PT. Rofaca Karalmasih belum memanfaatkan prinsip <i>good corporate governance</i> secara maksimal karena struktur organisasi perusahaan yang belum lengkap organnya, penyampaian informasi yang kurang terbuka, dan SOP (Standard Operational Procedures) yang</p>	<p>Penelitian terdahulu memfokuskan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> pada PT. Rofaca Karalmasih Abadi yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan fairness.. sedangkan peneliti memfokuskan apakah pelaksanaan <i>good corporate governance</i> pada</p>

		hanya disampaikan secara lisan .	Bank Syariah KCP Langkat Stabat sudah berjalan efektif serta kendala-kendala dalam pelaksanaan <i>good corporate governance</i> .
Dewi Dahlan (2018) “Pengaruh Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan di PT. Bank BTPN TBK Cabang Padang	Kuantitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder	Dalam upaya meningkatkan Kualitas pelayanan bank BTPN Cabang Padang maka perlu ditingkatkan <i>Good Corporate Governance</i> . Hal ini disebabkan variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan bank BTPN Cabang Padang.	Penelitian terdahulu memfokuskan upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan diterapkannya prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) tersebut. Sedangkan peneliti memfokuskan pada pelaksanaan <i>good corporate governance</i> apakah pelaksanaan <i>good corporate governance</i> pada Bank Syariah KCP Langkat Stabat sudah berjalan efektif serta kendala-kendala dalam pelaksanaan <i>good corporate governance</i> .

Berdasarkan penelitian terdahulu, persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti sama-sama meneliti tentang *good corporate*

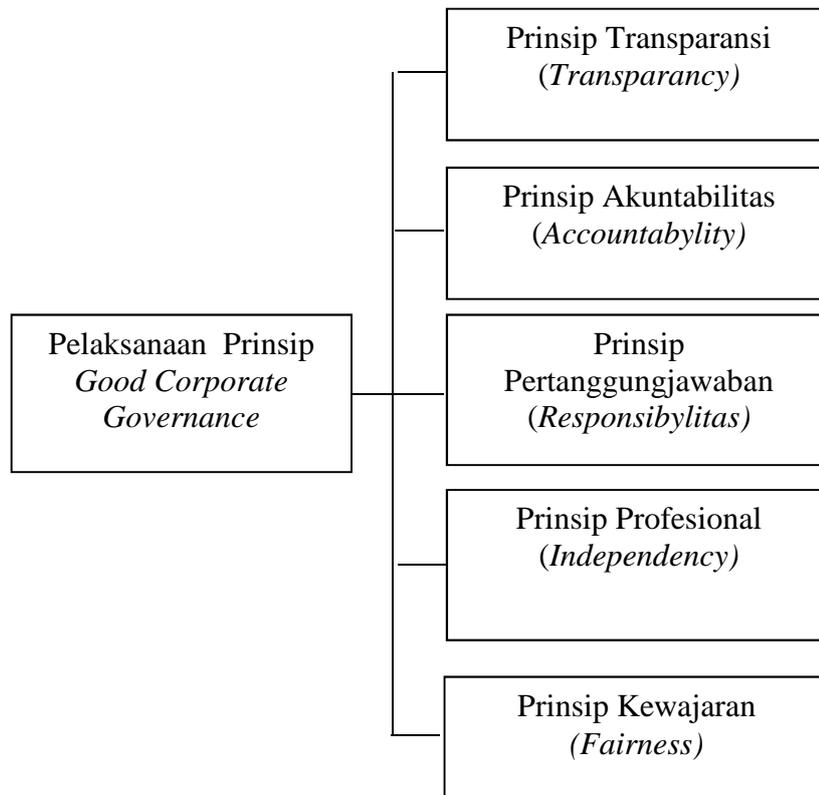
governance dalam suatu perusahaan dengan membahas bagaimana prinsip *good corporate governance* dalam suatu perusahaan jika diterapkan dengan baik dan sesuai akan berdampak baik bagi perusahaan tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah ruang lingkup penelitian, hasil penelitian dan penelitian ini hanya membahas tentang analisis pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada Bank BRI Syariah KCP Langkat Stabat apakah sudah berjalan dengan efektif, dilihat dari prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, profesional, dan kewajaran dan kendala-kendala dalam pelaksanaan *good corporate governance*.

E. Alur Penelitian

Menurut Arikunto alur penelitian adalah kronologi prosedural yang dilakukan seorang peneliti dalam karya penelitiannya dan bukan sekedar urutan apa yang mesti dilalui.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan diatas dapat digambarkan skema alur penelitian sebagai berikut :

⁴⁶ Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 13



Gambar 2.1
Alur Penelitian

Penjelasan :

Dalam pelaksanaan prinsip GCG terdapat lima prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, professional dan kewajaran. Berdasarkan penjelasan di atas, dalam skripsi ini akan diteliti mengenai pelaksanaan prinsip GCG pada Bank BRI Syariah KCP Langkat Stabat secara efektif dilihat dari prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, dan kewajaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam (*indepth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat masalah yang lain.⁴⁷

Menurut Sutopo, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan.⁴⁸

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang membuat gambaran (deskriptif) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.⁴⁹ Penelitian deskriptif menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank BRI Syariah KCP Langkat Stabat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank BRI Syariah KCP Langkat Stabat sudah berjalan efektif.

⁴⁷ Nur Ahmadi Bi Rahmani, "Metodologi Penelitian Ekonomi"(Medan:Febi UIN-SU Press, 2016), h. 4

⁴⁸ Ariesta Hadi Sutopo dan Adrianus Arief,"Terampil Mengelola Data Kualitatif"(Jakarta:Prenada Media Group, 2010), h. 1

⁴⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) h.76

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank BRI Syariah KCP Langkat Stabat yang berlokasi di Jl. Proklamasi No. 1 Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara, Kode Pos : 20732, Telepon : 618910707. Penentuan lokasi ini berdasarkan pada alasan bahwa bank BRI Syariah KCP Langkat Stabat merupakan Bank Syariah milik pemerintah yang ada di Langkat dan sudah melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga mampu memberikan informasi serta kebutuhan data-data yang diteliti.

Adapun waktu penelitian dilakukan selama 1 bulan yaitu dari tanggal 1-30 Mei 2020.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda dan lembaga (organisasi). Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Di dalam subjek penelitian inilah terdapat objek penelitian. Pada penelitian “Analisis Pelaksanaan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank BRI Syariah KCP Langkat Stabat, yang menjadi subjek penelitian adalah *Branch Operatinal Supervisor* (BOS) bernama ibu Syafridha. Menurut penulis, *Branch Operatinal Supervisor* (BOS) Bank BRI Syariah KCP Langkat Stabat tersebut dapat memberikan informasi secara jelas terkait pelaksanaan prinsip *good corporate governance* pada Bank BRI Syariah KCP Langkat Stabat.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi kepada pihak PT Bank BRI Syariah KCP Langkat Stabat. Data tersebut berupa pernyataan dari petugas PT Bank BRI Syariah KCP Langkat Stabat mengenai pelaksanaan prinsip *good corporate governance* di Bank BRI Syariah KCP Langkat Stabat,

struktur organisasi, dan penilaian *good corporate governance* Bank BRI Syariah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Data sekunder didapat dari bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, skripsi, jurnal, literasi dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.⁵⁰

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan sesuatu yang diteliti. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dimana sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah mewawancarai *Branch Operatinal Supervisor* (BOS) BRI Syariah KCP Langkat Stabat. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, skripsi fakultas ekonomi, jurnal, literasi dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

E. Tahap-Tahap Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah maka perlu disusun tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian tersebut. Ada tiga tahapan dalam melakukan penelitian. Adapun tahapan-tahapan penelitian ini adalah :

1. Tahapan Pra Lapangan

Dalam hal ini peneliti melakukan survey pendahuluan berupa penjajakan lapangan tentang latar penelitian, mencari data yang berkaitan dengan topik penelitian sampai perizinan yang harus dipenuhi.

2. Tahapan pekerjaan lapangan

Dalam hal ini peneliti terjun langsung kelapangan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data di lapangan.

3. Tahapan Analisis Data

⁵⁰Husein umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, edipsi ke 2, 2008), h. 42

Tahapan analisis data adalah melakukan serangkaian proses analisis kualitatif yaitu peneliti melakukan analisis berdasarkan rumusan data teori dalam membahas permasalahan yang ada untuk menarik kesimpulan.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data atau informasi dengan Tanya jawab secara langsung pada orang yang mengetahui tentang sesuatu hal yang diteliti. Dalam pengumpulan data melalui wawancara, penulis langsung mengadakan Tanya jawab dengan *Branch Operatinal Supervisor* (BOS) yang Memeriksa dan mengawasi segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional dan non operasional bank.

2. Metode Observasi

Metode observasi yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.⁵¹ Metode ini merupakan salah satu cara dimana peneliti mengadakan peninjauan dan penelitian langsung pada Bank BRI Syariah KCP Langkat Stabat untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih lengkap dan nyata.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau berupa catatan resmi, transkrip, buku, laporan, media massa dan sebagainya. Dokumentasi ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara mengambil gambar atau informasi penting dari objek penelitian.

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 34

G. Instrumen Penelitian

Menurut Moleong dalam pengumpulan data, pencari tahu (Peneliti) alamiah lebih banyak bergantung pada dirinya sendiri sebagai alat/instrument.⁵² Pada penelitian ini, penulis berperan sebagai instrument utama dalam menjangkau data dan informasi yang diperlukan. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan pedoman wawancara, *tape recorder*, kamera dan lainnya. Untuk melengkapi instrument yang digunakan, dibuat pula catatan lapangan yaitu catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan selama berlangsungnya pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan wawancara terstruktur, yaitu dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada BRI Syariah KCP Langkat Stabat. Handphone digunakan untuk merekam pembicaraan saat mengadakan wawancara dan juga digunakan untuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang dianggap mendukung serta mendapatkan kejelasan tentang data tertentu dalam penelitian, sementara catatan lapangan, seperti buku catatan serta pulpen digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap perlu dan mendukung penelitian.

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 19

H. Indikator penelitian

Tabel 3.1

Indikator prinsip – prinsip Good Corporate Governance

No	Aspek yang dinilai	Indikator	Sumber informasi
1.	Transparansi (<i>Transparency</i>)	a. Kemudahan mengakses informasi b. Ketersediaan informasi c. Kerahasiaan organisasi d. Penyampaian kebijakan e. Visi dan misi organisasi	<i>Branch Operatinal Supervisor (BOS) BRI</i> Syariah KCPLangkat Stabat
2.	Akuntabilitas (<i>Accountibility</i>)	a. Perincian tugas dan tanggung jawab b. Kompetensi yang sesuai c. Sistem pengendalian internal d. Pengukuran kinerja e. Pelaksanaan tugas sesuai	<i>Branch Operatinal Supervisor (BOS) BRI</i> Syariah KCPLangkat Stabat
3.	Pertanggungjawaban (<i>Responsibility</i>)	a. Kepatuhan hukum b. Tanggung jawab sosial c. Prinsip kehati – hatian	<i>Branch Operatinal Supervisor (BOS) BRI</i> Syariah KCP Langkat Stabat
4.	Profesional (<i>Independency</i>)	a. Dominasi dan pengaruh Pelaksanaan tugas sesuai tanggung jawab	<i>Branch Operatinal Supervisor (BOS) BRI</i> Syariah KCP Langkat Stabat
5.	Kewajaran (<i>Fairness</i>)	a. Kesempatan berpendapat b. Kesetaraan kompensasi c. Kesempatan karyawan	Branch Operatinal Supervisor (BOS). BRI Syariah KCP Langkat Stabat dan Customer Service

Sumber : Moh. Wahyudin Zarkasyi, Good Corporate Governance pada badan usaha manufaktur, perbankan, dan jasa keuangan lainnya (Bandung: Alfabeta, 2008)

I. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu strategi meneliti yang lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan informasi secara mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.⁵³

Miles dan Huberman mengemukakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Aktifitas dalam analisis data meliputi :⁵⁴

1. *Data Reduction* (reduksi data), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data melalui bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyingkirkan hal yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan dijelaskan.
Reduksi data dilakukan dengan merangkum data-data penting dari hasil wawancara tentang pelaksanaan prinsip *good corporate governance* pada bank BRI Syariah KCP Langkat Stabat
2. *Data Display* (penyajian data) adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar katagori, dan sejenisnya. Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas. Setelah data diperoleh, maka dapat dianalisis data dengan mengumpulkan segala hasil penelitian yang dilakukan.
3. *Conclusion Drawing/ verification*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya masih kurang jelas, sehingga tahap terakhir adalah menyimpulkan hasil data yang sudah

⁵³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 98

⁵⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.14

diperoleh dan dianalisis menjadi sebuah informasi yang akurat dan tepat.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah Bank BRI Syariah

BRI Syariah berawal pada tanggal 19 Desember 2007 saat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, mengakuisisi Bank Jasa Arta. Setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No: 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, PT Bank BRI Syariah kemudian secara resmi menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 17 November 2008.

PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah. Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern.

Aktivitas PT Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bapak Vantje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah.⁵⁵

Saat ini PT Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset PT Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada

⁵⁵ www.brisyariah.co.id Diakses pada 7 September 2020

segmen menengah bawah PT Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

b. Logo BRI Syariah



Gambar 4.1

Logo BRI Syariah

Sumber : www.brisyariah.co.id

Berdasarkan laman BRI Syariah, logo yang digunakan ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern seperti saat ini dan kombinasi warna biru dan putih yang digunakan mencirikan bahwa BRI Syariah masih memiliki benang merah dengan PT BRI (Persero) Tbk.

c. Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi Bank BRI Syariah

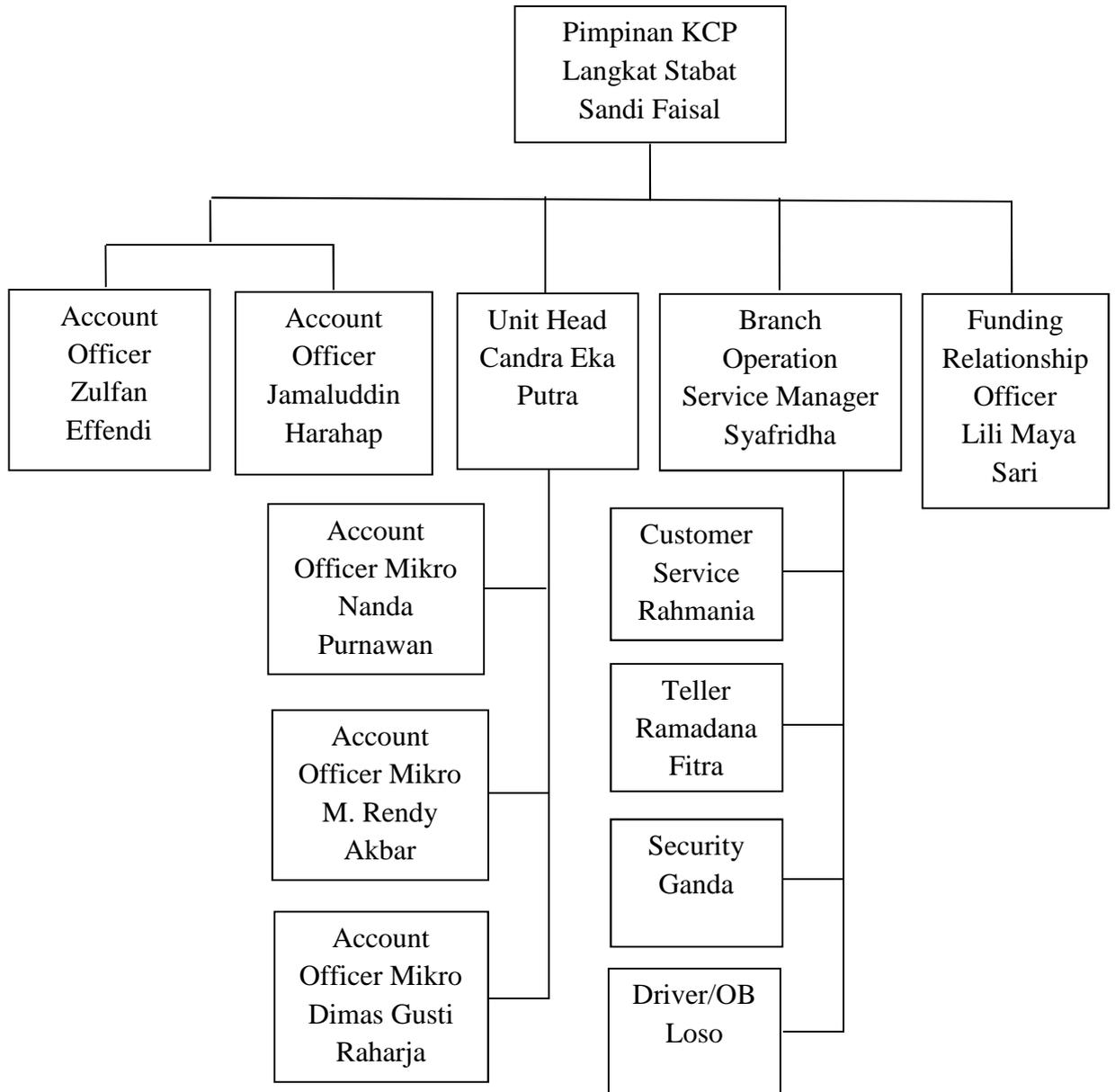
Menjadi bank ritel modern dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi Bank BRI Syariah

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.⁵⁶

⁵⁶ www.brisyariah.co.id Diakses Pada 7 September 2020

d. Struktur PT. BRI Syariah KCP Langkat Stabat



Gambar 4.2

Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Langkat Stabat

Sumber : Perusahaan BRI Syariah KCP Langkat Stabat

e. Produk Bank BRI Syariah KCP Langkat Stabat

a. Produk Pendanaan

1) Tabungan Faedah BRI Syariah iB

Tabungan BRI Syariah iB merupakan tabungan dari BRI Syariah bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan, dipersembahkan untuk anda yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan dengan 7 Faedah yang ditawarkan yakni, setoran awal yang ringan minimal Rp100.000, gratis biaya administrasi ulanan tabungan, gratis biaya bulanan kartu ATM, biaya cek salso, transfer dan tarik tunai murah seluruh jaringan ATM BRI, Bersama dan Prima serta biaya debit prima murah bagi nasabah dengan saldo di atas Rp500.000. semua faedah yang ditawarkan tersebut telah meningkatkan popularitas Tabungan Faedah BRI Syariah iB dan menjadikannya produk yang paling banyak diminati.

2) Tabungan Impian BRI Syariah iB

Tabungan Impian BRI Syariah iB merupakan tabungan berjangka dari BRI Syariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan.

3) Tabungan Haji BRI Syariah iB

Tabungan Haji BRI Syariah iB merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dengan akad *Mudharabah Muthalaqah*.

4) Tabunganku BRI Syariah iB

Tabunganku BRI Syariah iB merupakan produk dari bank BRI Syariah diperuntukkan kepada nasabah yang ingin memiliki tabungan.

5) Simpanan Pelajar (Simpel) iB

Simpanan Pelajar (Simpel) iB merupakan produk baru dari BRI Syariah yang diperuntukkan bagi siswa yang diterbitkan secara

nasional, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

6) Giro BRI Syariah iB

Giro BRI Syariah iB adalah bentuk simpanan yang diterima luas dikalangan masyarakat yang memiliki kebutuhan tambahan seperti pengelolaan dana dan kemudahan dalam melakukan kegiatan usaha mereka. Giro BRI Syariah iB diperuntukkan baik untuk perseorangan maupun non-perseorangan. Pada akhir tahun 2015, produk giro BRI Syariah iB mengalami pertumbuhan yang baik dan mencatatkan Rp942 miliar atau tumbuh sebesar 50,96% meningkat dari tahun sebelumnya Rp613 miliar pada tahun 2015.

7) Deposito BRI Syariah iB

Deposito BRI Syariah iB adalah produk yang dipersembahkan bagi nasabah yang memiliki keinginan untuk berinvestasi secara aman dan menguntungkan. Produk deposito BRI Syariah mencakup Deposito BRI Syariah iB, Deposito Pesat BRI Syariah iB dan Simpanan Faedah BRI Syariah iB. Deposito BRI Syariah iB merupakan produk deposito dengan minimal penempatan Rp2.500.000 dengan pilihan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Deposito Pesat BRI Syariah iB merupakan produk deposito dengan minimal penempatan Rp50.000.000 yang memberikan bagi hasil yang lebih besar.

b. Produk Pembiayaan

1) KPR BRI Syariah iB

KPR BRI Syariah iB merupakan pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan akad *murabahah* dan akad *ijarah muntahiya bittamlik*.

2) KKB BRISyariah iB

Pembiayaan Kepemilikan Mobil dari BRISyariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan

3) KPR Sejahtera BRI Syariah iB

KPR Sejahtera adalah Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB) yang diterbitkan Bank BRISyariah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang (develover).

4) Pembiayaan Mikro iB BRI Syariah

a) Mikro 25iB

Produk ini adalah produk pembiayaan usaha mikro dengan pembiayaan sebesar Rp5.000.000 s/d Rp25.000.000. jangka waktu pembiayaan yang diberikan 6 bulan s/d 12 bulan. Untuk nasabah Mikro 25iB untuk pertama kali pembiayaan harus menyerahkan jaminan sebagai tanda keseriusan atau kesungguhan nasabah dalam pembiayaan.

Namun, untuk pembiayaan yang selanjutnya tidak memerlukan jaminan apabila pada pembiayaan sebelumnya nasabah taat dalam membayar iuran/lancar setiap bulannya.

b) Mikro 75iB

Produk ini adalah produk pembiayaan usaha mikro dengan pembiayaan sebesar Rp25.000.000 s/d Rp75.000.000. jangka waktu pembiayaan yang diberikan 6 bulan s/d 60 bulan.

c) Mikro 200iB

Produk ini adalah produk pembiayaan usaha mikro dengan sebesar Rp75.000.000 s/d Rp500.000.000. Jangka waktu pembiayaan yang diberikan 6 bulan s/d 60 bulan.

d) KUR

BRI Syariah menawarkan kredit usaha rakyat dengan suku bunga rendah. Seperti yang telah kita ketahui, BRI Syariah telah menjadi Bank berbasis Syariah pertama yang mendapatkan izin untuk menyalurkan KUR. Melalui produk pembiayaan mikronya membantu para nasabah dengan cara memberikan pinjaman sebagai modal usaha untuk mengembangkan usaha atau membuka usaha baru. Nasabah dapat mengajukan pinjaman di BRI Syariah mulai dari Rp 0 juta hingga Rp 25 juta.

5) Pembiayaan Umrah BRI Syariah iB

Setiap muslim pasti merindukan baitullah, sempurnakan kerinduan anda pada Baitullah dengan ibadah Umrah, Pembiayaan Umrah BRISyariah iB hadir membantu anda untuk menyempurnakan niat anda beribadah dan berziarah ke Baitullah.

6) Pembiayaan KMF Purna BRI Syariah iB

KMF Purna adalah Kepemilikan Multifaedah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) atau sewa menyewa (*ijarah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

7) Pembiayaan KMF Pra Purna BRI Syariah iB

KMF pra purna iB adalah fasilitas pembiayaan kepada para PNS aktif yang akan memasuki masa pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) atau sewa menyewa

(*ijarah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan sampai memasuki masa pensiunan.

8) Pembiayaan KMF BRI Syariah iB

Kepemilikan Multi Faedah Pembiayaan yang diberikan khusus kepada karyawan untuk memenuhi segala kebutuhan (barang/jasa) yang bersifat konsumtif dengan cara yang mudah.

9) Pembiayaan Kepemilikan Emas BRI Syariah iB

Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan Akad Murabahah dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan.

10) Pembiayaan Qardh Beragun Emas BRI Syariah iB

Pembiayaan dengan agunan berupa emas, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BRIS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas.

11) Gadai BRI Syariah iB

Gadai BRI Syariah iB merupakan produk yang hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah untuk ketentraman nasabah.

c. Produk Jasa

1) Kartu ATM BRI Syariah dan kartu debit BRI Syariah

Kartu khusus yang diberikan oleh BRI Syariah kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi akan langsung mengurangi dana yang tersedia pada rekening. Apabila digunakan untuk bertransaksi di mesin ATM, maka disebut sebagai kartu ATM. Apabila digunakan dalam bertransaksi pembayaran dan pembelian non tunai dengan menggunakan mesin

Elektronik Data Capture (EDC) maka kartu tersebut digunakan sebagai kartu kredit.

2) CMS BRI Syariah iB

CMS BRISyariah iB sebagai layanan elektronik yang menyajikan layanan berupa transaksi finansial, antara lain transfer antar rekening BRISyariah atau ke rekening bank lain, electronic payroll systems, pembayaran tagihan hingga sistem laporan pembayaran dan non finansial (informasi saldo, laporan historis transaksi, dan download sebagai media penyajian laporan keuangan).

3) Internet Banking BRI Syariah

Internet Banking BRISyariah adalah fasilitas layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet yang dapat diakses selama 24 jam, kapan dan dimanapun Nasabah berada menggunakan Personal Computer, Laptop, Notebook atau smartphone. Internet Banking BRIS akan memberikan Anda kemudahan, kepraktisan, keamanan serta kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi secara online. Dengan layanan Internet Banking, transaksi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, selama terdapat koneksi jaringan internet.

4) University/ School Payment System (SPP)

Yaitu layanan untuk pembayaran uang sekolah maupun universitas atau sistem pembayaran (bill payment, sekolah atau universitas yang dibutuhkan BRIS untuk memudahkan para siswa/ mahasiswa untuk melakukan pembayaran biaya pendidikannya melalui layanan perbankan secara online.

5) E-Payroll

Merupakan rekening pembayaran gaji pegawai atau perusahaan.

6) BRIS Remittance

Layanan pengiriman/ penerimaan uang dengan metode notifikasi melalui telepon seluler/ handphone di mana penerima dapat mencairkan uang tersebut dengan menunjukkan notifikasi SMS yang diterima di telepon seluler yang didaftarkannya. Juga melayani pengiriman uang secara domestik dan dari luar negeri khususnya dari Malaysia, Hongkong dan segera menyusul dari Jepang. Pengambilan uang dapat dilakukan di seluruh kantor BRIS.

7) Mini Banking Syariah Salam BRIS

Adalah perangkat lunak laboratorium mini banking syariah yang dihibahkan kepada pihak rekanan BRIS.

8) MobileBRIS

MobileBRIS adalah layanan yang memungkinkan Nasabah memperoleh informasi perbankan dan melakukan komunikasi serta transaksi perbankan melalui perangkat yang bersifat mobile seperti telepon seluler/handphone menggunakan media menu pada aplikasi mobileBRIS dengan menggunakan media jaringan internet pada handphone yang dikombinasikan dengan media Short Message Service (SMS) secara aman dan mudah.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada BRI Syariah KCP Langkat Stabat

Good corporate governance sebagai suatu mekanisme dalam tata kelola organisasi secara baik yang melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, ataupun produktif yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan diantaranya kinerja keuangan, peningkatan laba, asset, dan pembiayaan. Dalam pelaksanaan *good corporate governance* terdapat prinsip-prinsip transparansi (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*independensi*), dan kewajaran

(*fairness*) dalam mencapai tujuan tersebut. Adapun hasil penelitian pelaksanaan prinsip *good corporate governance* pada bank BRI Syariah KCP Langkat Stabat adalah sebagai berikut :⁵⁷

a. Transparansi

Prinsip transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Aspek transparansi dilihat dari ketersediaan informasi, Menurut *Branch Operational Service* BRI Syariah KCP Langkat Stabat ibu Syafridha, BRI Syariah KCP Langkat Stabat menyediakan informasi yang cukup akurat, tepat waktu kepada segenap *Stakeholders*-nya. Informasi material berupa publikasi secara *continue* laporan keuangan tiap tri wulan dan tahunan, serta informasi berupa peningkatan pelayanan akses data. Selanjutnya keterbukaan dalam produk-produk yang terdapat di BRI Syariah KCP Langkat Stabat seperti produk simpanan maupun produk pembiayaan. Dalam produk simpanan terdapat banyak akad yang akan diterangkan kepada CS dan terdapat pada browser yang berisi tentang pengertian, jenis, dan jumlah bagi hasil. Sedangkan pada produk pembiayaan sama seperti produk simpanan terdapat banyak akad dan akan diterangkan kepada AO dan juga terdapat browser pembiayaan yang berisi tentang pengertian, jumlah, bentuk dan penggunaan pembiayaan, penarikan pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan pembayaran bagi hasil, pengakuan hutang, jaminan, asuransi terhadap barang-barang jaminan atau barang-barang yang dibiayai, asuransi terhadap pembiayaan atau jiwa pihak kedua, syarat-syarat yang harus diperhatikan pihak kedua, pemeriksaan dan pengawasan, pernyataan, biaya –biaya lainnya, domisili, dan ketentuan-ketentuan lain. Kesepakatan diwujudkan dengan

⁵⁷ Syafridha, *Branch Operational Service* BRI Syariah KCP Langkat Stabat, wawancara di Kantor BRI Syariah KCP Langkat Stabat, tanggal 4 Mei 2020, 10.30 WIB

penandatanganan akad oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Aspek transparansi dilihat dari kemudahan mengakses informasi. Menurut *Branch Operational Service* BRI Syariah KCP Langkat Stabat ibu Syafridha dalam hal ini transparansi diwujudkan oleh BRI Syariah KCP Langkat Stabat melalui peningkatan kualitas keterbukaan informasi, dengan cara mempersilahkan nasabah untuk mengakses sebagian informasi tertentu tentang bank, seperti neraca dan laporan keuangan yang telah diaudit yang dapat diakses pada situs *website* www.brisyariah.co.id. Selain itu masyarakat dan para pemegang saham juga dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan perusahaan. Hal tersebut dapat memberikan kemudahan bagi nasabah karena tidak perlu lagi datang ke bank. Dalam pengembangan teknologi informasi dan sistem manajemen informasi dari sebuah bank syariah memiliki tantangan terbesar yaitu kompleksitas. Kompleksitas ini terkait dengan ciri perbankan syariah yang masih tergolong sebagai industri muda. Di sisi lain pengembangan teknologi informasi merupakan salah satu keputusan strategis yang membutuhkan dana investasi besar. Hal ini juga diakui oleh BRI Syariah KCP Langkat Stabat. Dalam hal teknologi informasi BRI Syariah KCP Langkat Stabat belum bisa dikatakan unggul dan masih memerlukan banyak perbaikan yang harus ditindak lanjuti.

Aspek transparansi dilihat dari kerahasiaan bank dan penyampaian kebijakan. Menurut *Branch Operational Service* BRI Syariah KCP Langkat Stabat ibu Syafridha, BRI Syariah KCP Langkat Stabat sama seperti bank pada umumnya ada hal – hal yang tidak boleh diketahui oleh pihak luar dan harus dirahasiakan seperti data nasabah dan lainnya. Serta ada kebijakan-kebijakan perusahaan yang memang tidak boleh diketahui oleh pihak luar karena bersifat rahasia.

Aspek transparansi juga berkaitan dengan visi dan misi bank. Menurut *Branch Operational Service* BRI Syariah KCP Langkat Stabat ibu Syafridha, BRI Syariah KCP Langkat Stabat dalam menjalankan

kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan *good corporate governance*, dengan begitu dapat mempermudah mencapai visi dan misi dari Bank BRI Syariah KCP Langkat Stabat. Akan tetapi dalam keterbukaan visi dan misi tersebut tidak diterterakan di laman *website* BRI Syariah KCP Langkat. Karena sudah ada di laman *website* BRI Syariah.

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan diketahui bahwa aspek transparansi pada BRI Syariah KCP Langkat Stabat kurang efektif karena masih terdapat kekurangan pada aspek transparansi dilihat dari kemudahan mengakses informasi yaitu dalam hal teknologi informasi BRI Syariah KCP Langkat Stabat belum bisa dikatakan unggul dan masih memerlukan banyak perbaikan yang masih harus ditindak lanjuti. Di sisi lain pengembangan teknologi informasi merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan jumlah nasabah dan pemegang saham yang memberikan pengaruh yang besar pada tingkat laba bersih bank. Selanjutnya aspek transparansi dilihat dari visi dan misi bank. BRI Syariah KCP Langkat dalam keterbukaan visi dan misi tersebut tidak diterterakan di laman *website* BRI Syariah KCP Langkat karena menurut pihak bank sendiri sudah ada di laman *website* BRI Syariah. Akan tetapi seharusnya mencantumkan visi dan misi bank, karena dapat berpengaruh pada pertumbuhan bank, karena visi dan misi bank merupakan sesuatu yang dipandang sangat penting bagi para calon nasabah yang ingin menjadi nasabah bank BRI Syariah KCP Langkat dan otomatis berpengaruh pada peningkatan laba bank.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.⁵⁸

⁵⁸ Syafridha, *Branch Operational Service* BRI Syariah KCP Langkat Stabat, wawancara di Kantor BRI Syariah KCP Langkat Stabat, tanggal 11 Mei 2020, 10.30 WIB

Aspek akuntabilitas dilihat dari perincian tugas dan tanggung jawab. Menurut *Branch Operational Service* BRI Syariah KCP Langkat Stabat ibu Syafridha dalam pelaksanaannya BRI Syariah menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ bank. BRI Syariah juga mempunyai organ pada struktur organisasi yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Setiap karyawan BRI Syariah KCP Langkat Stabat diharuskan melaksanakan sesuai dengan DUJ (Daftar Uraian Jabatan) sesuai dengan jabatan-jabatan dan tugasnya. Dalam hal tersebut BRI Syariah KCP Langkat Stabat masih terdapat perangkapan DUJ dalam melakukan aktivitas bisnisnya dikarenakan dari SDM yang terbatas sehingga banyak *job* yang dirangkap oleh beberapa karyawan.

Aspek akuntabilitas dilihat dari kompetensi yang sesuai. Menurut *Branch Operational Service* BRI Syariah KCP Langkat Stabat ibu Syafridha, BRI Syariah KCP Langkat Stabat selalu memperhatikan setiap perkembangan dari kinerja karyawannya. Hal tersebut sudah diterapkan pada saat penerimaan karyawan BRI Syariah KCP Langkat Stabat tidak hanya melihat dari kejurusan tetapi juga berpatokan kepada pengalaman kerja dari si calon karyawan. Karena hal itu nantinya akan berpengaruh terhadap kompetensi yang dimiliki karyawan dan sangat berpengaruh pada kinerja bank. Setiap karyawan BRI Syariah KCP Langkat Stabat diharuskan melaksanakan sesuai dengan DUJ (Daftar Uraian Jabatan) dan sesuai dengan jabatan-jabatan dan tugasnya.

Aspek akuntabilitas dilihat dari sistem pengendalian internal. Menurut *Branch Operational Service* BRI Syariah KCP Langkat Stabat ibu Syafridha, BRI Syariah KCP Langkat Stabat menerapkan pengendalian intern untuk semua jenis transaksi. Dalam pengendalian diri sendiri merupakan lapisan pertama dan utama dalam diri setiap karyawan. Selain penegendalian diri, karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak terlepas dari peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini sudah menjadi sebuah budaya dalam BRI Syariah KCP Langkat Stabat,

karena bentuk pengendalian intern tersebut telah melekat pada sistem kerja setiap karyawan.

Aspek akurabilitas dilihat dari pengukuran kinerja. Menurut *Branch Operational Service* BRI Syariah KCP Langkat Stabat ibu Syafridha, BRI Syariah KCP Langkat Stabat selalu diaudit kinerjanya oleh lembaga-lembaga auditor, baik auditor internal, auditor eksternal serta dewan komisaris (komite audit). Hal ini dilakukan oleh BRI Syariah Pusat dan DPS. Bentuk pengawasan yang dilakukan DPS adalah dengan melakukan inspeksi medadak di setiap kantor BRI Syariah termasuk BRI Syariah KCP Langkat Stabat untuk melakukan analisis penerapan masalah produk, akad dan pelayanan. Adapun yang menjadi objek auditing dari DPS adalah menyangkut masalah kontrak, akad, kebijakan, produk, transaksi, memorandum, dan akta perjanjian, laporan keuangan.

Aspek akuntabilitas dilihat dari pelaksanaan tugas sesuai pedoman. Menurut *Branch Operational Service* BRI Syariah KCP Langkat Stabat ibu Syafridha, seluruh kegiatan di BRI Syariah KCP Langkat Stabat dituntun untuk patuh terhadap semua peraturan, baik undang-undang maupun prinsip-prinsip syariah. Karyawan BRI Syariah KCP Langkat Stabat dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, karena BRI Syariah KCP Langkat Stabat memiliki daftar uraian jabatan yang masing-masing tugas sudah dibagikan menurut jabatannya.

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan diketahui bahwa aspek akuntabilitas pada BRI Syariah KCP Langkat Stabat kurang efektif karena masih terdapat kekurangan pada aspek akuntabilitas dilihat dari perincian tugas dan tanggung jawab, dimana BRI Syariah KCP Langkat Stabat masih terdapat perangkapan DUJ (Daftar Uraian Jabatan) dalam melakukan aktivitas bisnisnya dikarenakan dari SDM yang terbatas sehingga banyak *job* yang dirangkap oleh beberapa karyawan. Hal tersebut sebenarnya dapat mempengaruhi laba bank, karena dapat terjadi

pengambilan keputusan yang kurang optimal saat bekerja yang akan berpengaruh pada peningkatan laba bank.

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

Aspek responsibilitas dilihat dari kepatuhan hukum. Menurut *Branch Operational Service* BRI Syariah KCP Langkat Stabat ibu Syafridha, BRI Syariah KCP Langkat Stabat dalam semua kegiatannya telah mematuhi hukum-hukum yang berlaku, baik itu hukum perundang-undangan seperti masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja. Serta hukum-hukum syariah yang telah ditetapkan seperti bersih dari riba, dan berlaku adil tanpa memandang apapun.⁵⁹

Aspek responsibilitas dilihat dari bentuk pertanggungjawaban sosial. Menurut *Branch Operational Service* BRI Syariah KCP Langkat Stabat ibu Syafridha, BRI Syariah KCP Langkat Stabat memberikan pinjaman lunak yang disebut dengan *qardh* dan pinjaman kebajikan yang dikenal dengan *qardhul hasan*. Apabila nasabah memang tidak mengembalikan pinjamannya dengan alasan yang dibenarkan oleh pihak bank, maka nasabah diperkenankan untuk tidak mengembalikan dari dana ZIS yang ada pada BRI Syariah KCP Langkat Stabat. BRI Syariah KCP Langkat Stabat berkomitmen untuk selalu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan program kepedulian perusahaan terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya.

Aspek responsibilitas dilihat dari prinsip kehati-hatian. Menurut *Branch Operational Service* BRI Syariah KCP Langkat Stabat ibu Syafridha, dalam mengelola unit bisnis selalu dihadapkan dengan *risk and return* (resiko dan pendapatan). Maka dari sangat diperlukan prinsip-

⁵⁹ Syafridha, *Branch Operational Service* BRI Syariah KCP Langkat Stabat, wawancara di Kantor BRI Syariah KCP Langkat Stabat, tanggal 14 Mei 2020, 10.30 WIB

prinsip kehati-hatian pada perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan UU No 10 Tahun 1998 pasal 29 ayat (2) yang mengemukakan bahwa : “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal kualitas asset, kualitas manajemen, liquiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. BRI Syariah KCP Langkat Stabat telah menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian terutama pada resiko-resiko yang terdapat pada bank yaitu:

- 1) *Systematic risk* (resiko yang sistematis) yaitu resiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum.
- 2) *Unsystematic risk* yaitu resiko yang unik yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja.

Dalam melakukan manajemen resiko di bidang *funding* (pendanaan) , BRI Syariah KCP Langkat Stabat menerapkan manajemen resiko pendanaan. Hal ini ditempuh bank dengan cara mengetahui data pribadi nasabah yang meliputi data pekerjaan, data perusahaan dan data keuangan lain. Hal tersebut dilakukan BRI Syariah KCP Langkat Stabat untuk meminimalisir resiko yang mungkin akan dihadapi. Dalam hal manajemen resiko pembiayaan diwujudkan oleh bank dengan cara melakukan pembinaan dari awal pembiayaan sampai pembiayaan itu lunas. Itu fungsi analisis 5C oleh *Analyst Officer* (AO) sebagai upaya untuk meminimalisir resiko, khususnya dalam hal pembiayaan.

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan diketahui bahwa aspek pertanggung jawaban (*responsibility*) pada BRI Syariah KCP Langkat Stabat sudah efektif karena BRI Syariah KCP Langkat Stabat dalam semua kegiatannya telah mematuhi hukum-hukum yang berlaku, baik itu hukum

perundang-undangan dan hukum syariah, serta melaksanakan prinsip kehati-hatian.

d. Profesional (*Independency*)

Profesional yaitu memiliki kompetensi, maupun bertindak objektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (*Independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

Aspek profesional dilihat dari dominasi dan pengaruh. Menurut *Branch Operational Service* BRI Syariah KCP Langkat Stabat ibu Syafridha, dalam pengambilan keputusan oleh BRI Syariah KCP Langkat Stabat sesuai dengan protokol atau kebijakan bank yang sudah ada dan disamping dari kebijakan tersebut pengambilan keputusan bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun dan dilakukan secara objektif, dan juga tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Aspek profesional dilihat dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Menurut *Branch Operational Service* BRI Syariah KCP Langkat Stabat ibu Syafridha, dalam pelaksanaannya BRI Syariah menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ bank. BRI Syariah juga mempunyai organ pada struktur organisasi yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Setiap karyawan BRI Syariah KCP Langkat Stabat diharuskan melaksanakan sesuai dengan DUJ (Daftar Uraian Jabatan) sesuai dengan jabatan-jabatan dan tugasnya.⁶⁰

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan diketahui bahwa aspek profesional (*Independency*) pada BRI Syariah KCP Langkat Stabat sudah efektif karena dalam pengambilan keputusan BRI Syariah KCP Langkat Stabat sesuai dengan protokol atau kebijakan bank terbebas dari tekanan manapun dan pelaksanaannya BRI Syariah sudah menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ bank.

⁶⁰ Syafridha, *Branch Operational Service* BRI Syariah KCP Langkat Stabat, wawancara di Kantor BRI Syariah KCP Langkat Stabat, tanggal 18 Mei 2020, 10.30 WIB

e. Kewajaran atau keadilan (*Fairness*)

Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memengaruhi hak-hak stakeholder berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

BRI Syariah KCP Langkat Stabat selalu memberikan hak-hak anggotanya. Karyawan tidak dibeda-bedakan dengan karyawan lainnya, kerjasama yang sehat dan saling memotivasi serta tidak membedakan nasabah dari kalangan bawah, menengah maupun kalangan atas.

Aspek *fairness* dilihat dari kesempatan berpendapat. Menurut *Branch Operational Service* BRI Syariah KCP Langkat Stabat ibu Syafridha, dalam hal ini BRI Syariah KCP Langkat Stabat memberikan kebebasan berpendapat bagi setiap *stakeholder*, nasabah serta karyawan untuk kemajuan BRI Syariah KCP Langkat Stabat.⁶¹

Aspek *fairness* dilihat dari kesetaraan kompensasi sama dengan bank-bank lainnya. Menurut *Branch Operational Service* BRI Syariah KCP Langkat Stabat ibu Syafridha, BRI Syariah KCP Langkat Stabat akan memberikan kompensasi apabila karyawan mencapai atau melebihi target. Namun jika melakukan pelanggaran seperti tidak disiplin maka karyawan dapat dikenakan surat peringatan (SP). Jam kerja BRI Syariah KCP Langkat Stabat dari jam 08.00 sampai 16.00 WIB. Kemudian pembayaran gaji yang dilakukan setiap akhir bulan tidak ada pengunduran atau telat pembayaran.

Aspek *fairness* dilihat dari kesempatan karyawan. Menurut *Branch Operational Service* BRI Syariah KCP Langkat Stabat ibu Syafridha, selain kompensasi dan kebebasan berpendapat, bagi karyawan baru di BRI Syariah KCP Langkat Stabat memiliki kesempatan mendapatkan *training* atau pelatihan kerja sebelum beroperasi di bank. Hal tersebut sangat berpengaruh pada kemajuan BRI Syariah KCP Langkat Stabat karena kemajuan bank itu sendiri tergantung karyawanan yang menjalankannya.

⁶¹ Syafridha, *Branch Operational Service* BRI Syariah KCP Langkat Stabat, wawancara di Kantor BRI Syariah KCP Langkat Stabat, tanggal 18 Mei 2020, 10.30 WIB

Akan tetapi tahun ini tidak dilakukannya training, pada karyawan baru, karena tidak adanya waktu untuk melakukannya walaupun demikian masih terdapat pengawasan yang khusus dari pihak BOS dalam kegiatan bank.

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan diketahui bahwa aspek kewajaran atau keadilan (*Fairness*) pada BRI Syariah KCP Langkat Stabat kurang efektif karena masih terdapat kekurangan pada aspek *fairness* dilihat dari kesempatan karyawan, dimana tidak adanya masa *training* atau pelatihan kerja pada karyawan baru yang akan berakibat buruk bagi kemajuan suatu bank, karena dalam hal kemajuan bank itu sendiri tergantung karyawanan yang menjalankannya yang berpengaruh pada pengambilan keputusan seorang karyawan yang apabila salah dalam pengambilan keputusan akan berdampak buruk tidak hanya pada laba bank saja tetapi pada kemajuan bank itu sendiri.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada BRI Syariah KCP Langkat Stabat

Setiap perusahaan memiliki beberapa kendala dalam menjalankan tujuannya, baik halnya BRI Syariah KCP Langkat Stabat juga memiliki kendala dalam pelaksanaan prinsip *good corporate governance*. Adapun kendala-kendala yang dihadapi BRI Syariah KCP Langkat Stabat dalam pelaksanaan prinsip *good corporate governance* yaitu :⁶²

a. Transparansi

Dalam aspek transparansi terdapat kendala-kedala dalam pelaksanaannya yaitu dalam hal teknologi informasi BRI Syariah KCP Langkat Stabat belum bisa dikatakan unggul dan masih memerlukan banyak perbaikan yang masih harus ditindak lanjuti serta kurangnya kesadaran karyawan dalam melaksanakan prinsip GCG ini sehingga tidak berjalan dengan efektif. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan diketahui bahwa kendala tersebut masih dapat diminimisir dengan cara

⁶² Syafridha, *Branch Operational Service* BRI Syariah KCP Langkat Stabat, wawancara di Kantor BRI Syariah KCP Langkat Stabat, tanggal 20 Mei 2020, 10.30 WIB

melakukan analisis tentang perkembangan teknologi informasi bank lain yang lebih unggul, contohnya pada bank syariah yang ada di Negara Malaysia, sehingga bank dapat maju dan dapat meningkatkan laba. Serta melakukan pelatihan pelaksanaan prinsip GCG agar timbul dengan sendirinya kesadaran pada diri karyawan tentang pentingnya pelaksanaan GCG dalam pengoperasian bank.

b. Akuntabilitas

aspek akuntabilitas terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya jumlah karyawan bank sehingga adanya perangkapan *job* yang tidak sesuai dengan daftar uraian jabatan yang membuat bank tidak melaksanakan prinsip GCG dengan efektif. Hal itu dilakukan tidak terlepas dari sebabnya yaitu dimana BRI Syariah yang terletak di Langkat Stabat ini merupakan bank Kantor cabang pembantu yang tidak memerlukan banyak karyawan dan masih bisa dirangkap dan tidak terjadi masalah. Akan tetapi jika nasabah membeludak dapat menjadi masalah yaitu kurang cepatnya dalam pelayanan yang membuat nasabah kurang nyaman karena mengantri cukup lama.⁶³

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan diketahui bahwa kendala tersebut masih dapat diminimalisir dengan menambahkan sedikit karyawan di BRI Syariah KCP Langkat Stabat meskipun hanya kantor cabang pembantu seharusnya pihak BRI Syariah tidak boleh mengenyampingkan hal tersebut, karena pertumbuhan dan perkembangan suatu bank bermula dari yang kecil yaitu kantor cabang pembantu.

c. Pertanggungjawaban (*responsibilitas*)

Aspek *resbonsibilitas* terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya yaitu meskipun sudah mematuhi hukum-hukum yang ada baik hukum perundang-undangan maupun syariah terdapat masalah yang

⁶³ Syafridha, *Branch Operational Service* BRI Syariah KCP Langkat Stabat, wawancara di Kantor BRI Syariah KCP Langkat Stabat, tanggal 25 Mei 2020, 10.30 WIB

diluar dari perusahaan yaitu dari pihak nasabah yang terkadang melakukan pelanggaran, misalnya terdapat kredit macet.

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan diketahui bahwa kendala tersebut pasti dapat dihadapi bank karena terdapat huku-hukum yang menangani tentang prinsip kehati-hatian bank agar nasabah tidak melakukan pelanggaran seperti kredit macet.

d. Profesional (*independensi*)

Aspek Profesional terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya yaitu dalam pengambilan keputusan pasti tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh manapun baik itu dari pimpinan, karyawan lain maupun nasabah. Maka dari aspek ini sangat diperlukan keteguhan yang kuat dari diri karyawan.

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan diketahui bahwa kendala tersebut dapat dihindari dengan mendekati diri kepada Allah dan selalu berdoa sebelum melaksanakan pekerjaan sehingga terhindar dari pengaruh dan keputusan yang salah.

e. Kewajaran atau keadilan (*fairness*)

Aspek *fairness* terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya yaitu dalam hal *training* atau pelatihan kerja bagi karyawan baru terkadang pihak BRI Syariah KCP Langkat Stabat tidak melakukannya karena kurangnya waktu sedangkan bank harus beroperasi terus dalam kegiatannya. Meskipun tidak dilakukan *training* terdapat pihak bank yang mengawasi karyawan baru agar pekerjaannya optimal.

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan diketahui bahwa kendala tersebut dapat dihindari dengan pengaturan waktu pembukaann lowongan pekerjaan yang seharusnya dilakukan dengan baik dan tersusun jadwal nya sehingga tidak ada kekosongan karyawan sebelum dilakukannya *training* atau pelatihan kerja.⁶⁴

⁶⁴ Syafridha, *Branch Operational Service* BRI Syariah KCP Langkat Stabat, wawancara di Kantor BRI Syariah KCP Langkat Stabat, tanggal 25 Mei 2020, 10.30 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di BRI Syariah KCP Langkat Stabat maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada BRI Syariah Langkat yaitu :
 - a. Pelaksanaan prinsip transparansi pada BRI Syariah KCP Langkat Stabat kurang efektif. Hal ini dilihat dari aspek transparansi dalam kemudahan mengakses informasi yaitu dalam hal teknologi informasi BRI Syariah KCP Langkat Stabat belum bisa dikatakan unggul dan aspek transparansi dilihat dari visi dan misi bank dalam keterbukaan visi dan misi tersebut tidak diterterakan di laman *website* BRI Syariah KCP Langkat. Dalam hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kepercayaan pemegang saham serta nasabah yang akan berpengaruh pada peningkatan laba.
 - b. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas pada BRI Syariah KCP Langkat Stabat kurang efektif karena masih terdapat kekurangan pada aspek akuntabilitas dilihat dari perincian tugas dan tanggung jawab, dimana BRI Syariah KCP Langkat Stabat masih terdapat perangkapan DUJ (Daftar Uraian Jabatan) dalam melakukan aktivitas bisnisnya dikarenakan dari SDM yang terbatas sehingga banyak *job* yang dirangkap oleh beberapa karyawan. Hal tersebut sebenarnya dapat mempengaruhi laba bank, karena dapat terjadi pengambilan keputusan yang kurang optimal saat bekerja yang akan berpengaruh pada peningkatan laba bank.
 - c. Pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban (*responsibilitas*) pada BRI Syariah KCP Langkat Stabat sudah efektif karena BRI Syariah KCP Langkat Stabat dalam semua kegiatannya telah mematuhi hukum-

hukum yang berlaku, baik itu hukum perundang-undangan dan hukum syariah, serta melaksanakan prinsip kehati-hatian.

- d. Pelaksanaan prinsip profesional (*independency*) pada BRI Syariah KCP Langkat Stabat sudah efektif karena dalam pengambilan keputusan BRI Syariah KCP Langkat Stabat sudah sesuai dengan protokol atau kebijakan bank terbebas dari tekanan manapun dan pelaksanaannya BRI Syariah sudah menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ bank.
 - e. Pelaksanaan prinsip kewajaran atau keadilan (*Fairness*) pada BRI Syariah KCP Langkat Stabat kurang efektif karena masih terdapat kekurangan pada aspek *fairness* dilihat dari kesempatan karyawan, dimana tidak adanya masa *training* atau pelatihan kerja pada karyawan baru yang akan berakibat buruk bagi kemajuan suatu bank, karena dalam hal kemajuan bank itu sendiri tergantung karyawanan yang menjalankannya yang berpengaruh pada pengambilan keputusan seorang karyawan yang apabila salah dalam pengambilan keputusan akan berdampak buruk tidak hanya pada laba bank saja tetapi pada kemajuan bank itu sendiri.
2. Kendala yang dihadapi BRI Syariah KCP Langkat Stabat dalam melaksanakan prinsip *good corporate governance* yaitu :
- a. Pada pelaksanaan prinsip transparansi, kurangnya kesadaran karyawan dalam dalam melaksanakan prinsip GCG ini sehingga tidak berjalan dengan efektif.
 - b. Pada pelaksanaan prinsip akuntabilitas, kurangnya jumlah karyawan bank sehingga adanya perangkapan *job* yang tidak sesuai dengan daftar uraian jabatan yang membuat bank tidak melaksanakan prinsip GCG dengan efektif.
 - c. Pada pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban meskipun sudah mematuhi hukum-hukum yang ada baik hukum perundang-undangan maupun syariah terdapat masalah yang diluar dari perusahaan yaitu

dari pihak nasabah yang terkadang melakukan pelanggaran, misalnya terdapat kredit macet.

- d. Pada pelaksanaan prinsip professional (*independency*) terdapat pengaruh-pengaruh manapun baik itu dari karyawan lain maupun nasabah dalam pengambilan keputusan sehingga dapat mengganggu keteguhan hati.
- e. Pada pelaksanaan prinsip keadilan (*fairness*), kurangnya waktu dalam hal *training* atau pelatihan kerja bagi karyawan baru yang terkadang pihak BRI Syariah KCP Langkat Stabat tidak melakukannya sehingga tidak maksimalnya pelaksanaan GCG.

B. Saran

Setelah peneliti menyajikan, menelaah, dan mengkaji, serta menganalisis dengan seksama terhadap data yang terkumpul dan sampai pada hasil akhir, peneliti menyadari masih banyak kekurangan di dalamnya, untuk itu peneliti memberikan beberapa saran untuk bahan pertimbangan sebagai penyempurnaan penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian serupa antara lain :

1. Bagi BRI Syariah KCP Langkat Stabat

BRI Syariah KCP Langkat Stabat diharapkan senantiasa mengontrol dan memotivasi para karyawan dalam membina anggota untuk membentuk karakter karyawan sesuai budaya kinerja yang dilaksanakan dengan berbagai kegiatan. BRI Syariah KCP Langkat Stabat juga diharapkan sering mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) agar memiliki rasa kesadaran serta tanggung jawab terhadap prinsip *good corporate governance* yang menjadikan kelembagaan tumbuh besar dan semakin tumbuh rasa ingin dalam memajukan kualitas *good corporate governance* dengan baik. BRI Syariah KCP Langkat Stabat dalam pelaksanaan GCG telah berusaha menerapkan sesuai dengan pedoman dengan baik, oleh karena itu

hendaknya perlu dipertahankan dan ditingkatkan lebih baik lagi dan dapat diterapkan secara efektif.

2. Bagi Akademisi

Penulis menyarankan agar dapat lebih mengkaji dan mempelajari serta mengembangkan tentang *good corporate governance* dalam perbankan syariah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperluas cakupan pelaksanaan prinsip *good corporate governance* bank dengan menambah variabel-variabel lainnya diluar dari variable peneliti.

Daftar Pustaka

- Amir, Machmud dan Rukmana. *Bank Syariah : Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta : Erlangga, 2010
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insane Press & Tazkia Institute, 2001
- Arifin Bey. *Pengaruh Faktor-Faktor Kepuasan Terhadap Kinerja Karyawan, Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi* Vol.2 No. 1 Tahun 2005
- Asiyah, N.B. *Manajemen pembiayaan bank syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, cet. 1, 2015
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang *Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum*, Jakarta, 2006
- Bi Rahmani, Nur Ahmadi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan:Febi UIN-SU Press, 2016
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007
- Daniri, Mas Achmad. *Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia*, Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*, Bandung: CV Diponegoro, 2000
- Djazuli, A. dan Yanuari Yadi. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: Rajawali Press, 2001
- Effendi, *The Power of Good Corporate Governance : Teori dan Implementasi*, Jakarta : Salemba Empat, 2016
- Firdaus NH, Muhammad, dkk. *Konsep & Implentasi Bank Syariah*, Jakarta:Renaissance, 2005
- Forum for Corporate in Indonesia*. www.fcgi.or.id 2001
- Forum for Corporate in Indonesia*. www.fcgi.or.id, 2015
- Guntara, Dwiky, Muhammad Irwan Padli Nasution, 2020, *Implementasi Metode Economic Order Quantity Pada Aplikasi Pengendalian Bahan Produksi Sandal Mirado*, JURNAL TEKNIK INFORMATIKA, vol 13, no: 1 pp.31-4

- Hamid, Ahmad dan Mukhlis Yunus, Sulaiman, “*Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pegawai dan Dampaknya Terhadap Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bireuen*”. Jurnal Manajemen Pascasarjana. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. Vol. 4, No. 4. ISSN 23020199 (November, 2015)
- Haris, Helmi. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Sleman: Asnalitera, 2013
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004
- Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik. *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta : Total Media, 2007
- Kaihatu, Thomas. *Good Corporate Governance Dan Penerapannya di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, (Volume 8 Nomor 1, 2006)
- Komite Nasional Kebijakan, *Corporate Governance, Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, Januari, 2004
- Laporan Pelaksanaan GCG BRI Syariah, 2018*”. Diakses pada bulan Maret 2019 pada situs : <https://islamicmarkets.com/publications/bank-brisyariah-annual-report-2018>
- Muhammad. *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000 dan 2011
- Nasution, Muhammad Irwan Padli, 2012, Sistem Informasi Pengontrolan Mutu Produk Pada PT SC Johnson Manufacturing Medan, *Seminar Nasional Informatika 2012 (SNIf-2012)*
- Nasution, Muhammad Irwan Padli, 2014, Keunggulan Kompetitif dengan Teknologi Informasi. Jurnal Elektronik
- Nurlia Ismatika, “ *Pengaruh Good Corporate Governance dan Manajemen Laba Terhadap Kinerja Keuangan*”, (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2012)

- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang *Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, Jakarta, 2009
- Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PKES Publishing, 2008
- Situs Resmi BPKP 2018, diakses dari:
<http://www.bpkp.go.id/dan/konten/299/Good-Corporate.bpkp>. pada: Sabtu, 8 September 2018, pkl. 14.10.
- Sugiarto Endar, *Spikologi Pelayanan Dalam Industri Jasa*, Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama 2002
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Bandung:Alfabeta, 2008
- Sutedi, Adrian. *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Sutopo, Ariesta Hadi dan Adrianus Arief. *Terampil Mengelola Data Kualitatif*, Jakarta : Prenada Media Group, 2010
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Syafridha, *Branch Operational Service BRI Syariah KCP Langkat*, wawancara di Bank BRI Syariah KCP Langkat Stabat, 11 Mei 2020.
- Umam, Khotibul S.H., LL.M dkk. *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Umar,Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, edisi ke 2, 2008
- Usman, Rahmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014
- Wibowo,Edi. *Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, Vol. 10, No. 2, (2010)
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir *Alquran dan terjemahnya* (Departemen Agama Republik Indonesia: 2010)
- Zakarsyi, M. Wahyudin. *Good Corporate Governance : Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, Bandung : Alfabeta, 2008

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara di BRI Syariah KCP Langkat Stabat

PEDOMAN WAWANCARA

PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

PADA BRI SYARIAH KCP LANGKAT STABAT

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Oleh karena itu untuk memperoleh data yang lengkap diperlukan pedoman wawancara yang sesuai dengan fokus penelitian. Pedoman wawancara ini merupakan himbauan dari pokok-pokok penelitian:

A. Lokasi penelitian : Jl. Proklamasi No. 1 Kwala Bingai Kec. Stabat Kab.
Langkat Prov. Sumatera Utara

B. Identitas Informan

1. Nama : Syafridha
2. Pekerjaan : Karyawan di BRI Syariah KCP Langkat Stabat
3. Alamat : Jl. Proklamasi No. 1 Kwala Bingai Kec. Stabat Kab.
Langkat Prov. Sumatera Utara

C. Pertanyaan

1. Apakah di BRI Syariah KCP Langkat Stabat sudah melaksanakan prinsip *good corporate governance*?
2. kapan prinsip *good corporate governance* di BRI Syariah KCP Langkat Stabat mulai dilaksanakan ?
3. Bagaimana penerapan prinsip GCG bila ditinjau dari prinsip transparansi di BRI Syariah KCP Langkat Stabat?
4. Bagaimana penerapan prinsip GCG bila ditinjau dari prinsip akuntabilitas di BRI Syariah KCP Langkat Stabat?

5. Bagaimana penerapan prinsip GCG bila ditinjau dari prinsip pertanggung jawaban (*responsibility*) di BRI Syariah KCP Langkat Stabat?
6. Bagaimana penerapan prinsip GCG bila ditinjau dari prinsip professional (*independen*) di BRI Syariah KCP Langkat Stabat?
7. Bagaimana penerapan prinsip GCG bila ditinjau dari prinsip kewajaran atau keadilan (*fairness*) di BRI Syariah KCP Langkat Stabat?
8. Perkembangan apa saja yang terjadi setelah menerakan prinsip GCG ?
9. Apakah terdapat peningkatan kinerja karyawan dengan adanya pelaksanaan GCG di BRI Syariah KCP Langkat Stabat?
10. Apakah terdapat peningkatan jumlah nasabah, laba bersih, asset, serta pembiayaan dengan dilaksanakannya GCG di BRI Syariah KCP Langkat Stabat?
11. Apakah ada kendala dari dilaksanakannya prinsip GCG di BRI Syariah KCP Langkat Stabat?

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara



Lampiran 3. Surat Izin Riset

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA
UTARA MEDAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683**

Nomor : B-3257/EB.I/KS.02/08/2020

4 Mei 2020

Lampiran : -

Hal : **Izin Riset**

Yth. Bapak/Ibu Kepala Pimpinan BRI Syariah KCP Langkat Stabat

Assalamulaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Wahyu Indri Astuti
NIM : 0503161030
Tempat/Tanggal Lahir : Benteng Rejo, 12 Oktober 1998
Program Studi : Perbankan Syariah
Semester : IX (Sembilan)
**Alamat : Dusun XII benteng rejo desa tebing tanjung
 selamat,kec.padang tualang,kab.langkat. Kelurahan
 Tebing tanjung selamat Kecamatan padang tualang**

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di PT. BRI Syariah KCP Langkat Stabat, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

Analisis Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance Pada BRI Syariah KCP Langkat Stabat

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 4 Mei 2020
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag
NIP. 197604232003121002

Tembusan:
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan

info : Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Wahyu Indri Astuti
2. NIM : 0503161030
3. Tempat/Tanggal Lahir : Benteng Rejo, 12 Oktober 1998
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Dsn. XII Benteng Rejo Desa Tebing Tanjung
Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Negeri No. 058295 Benteng Sari Berijazah tahun 2010
2. Tamatan Mts. Swasta Al Washliyah Batang Serangan Berijazah tahun 2013
3. Tamatan SMA Negeri 1 Padang Tualang Berijazah tahun 2016
4. Tamatan S1Perbankan Syariah UIN SU Berijazah 2021

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. HIMALA Tahun 2016
2. E2AR Tahun 2016
3. UIE UIN SU Tahun 2017
4. KSPMS GOLDEN UIN SU Tahun 2017